



UNIVERSITAS INDONESIA

Kelas Sosial dan Penilaian Keadilan Prosedural

Social Class and Procedural Justice Judgment

TESIS

Abu Bakar Fahmi

1206297661

**FAKULTAS PSIKOLOGI
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA
DEPOK
DESEMBER 2014**



UNIVERSITAS INDONESIA

Kelas Sosial dan Penilaian Keadilan Prosedural

Social Class and Procedural Justice Judgment

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister
Sains**

**Abu Bakar Fahmi
1206297661**

**FAKULTAS PSIKOLOGI
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA
DEPOK
DESEMBER 2014**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Abu Bakar Fahmi

NPM : 1206297661

Tanda tangan :



Tanggal : 30 Desember 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Abu Bakar Fahmi
NPM : 1206297661
Program Studi : Psikologi, Program Pascasarjana
Judul Tesis : Kelas Sosial dan Penilaian Keadilan Prosedural

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Psikologi Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing Dr. Bagus Takwin, M.Hum.
NIP. 0800300001



Penguji 1 Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si.
NIP. 196603311999031001



Penguji 2 Mgr. Erita Narhetali, S.Psi.
NIP. 080603018



Depok, 30 Desember 2014

Ketua Program Pascasarjana
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

Dekan
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia



Prof. Dr. Guritnaningsih
NIP. 195304201977032001



Dr. Tjut Rifameutia Umar Ali, M.A.
NIP. 196001131987032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT., atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya menyadari, tanpa bantuan dari berbagai pihak, sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bagus Takwin, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penulisan tesis ini;
2. Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si. selaku dosen penguji pertama saya. Terima kasih banyak atas semua masukan dan saran yang sangat membangun dalam penulisan tesis ini;
3. Mgr. Erita Narhetali, S.Psi. selaku dosen penguji kedua saya. Terima kasih banyak atas semua masukan dan saran yang sangat membangun dalam penulisan tesis ini;
4. Maisaroh, S.E., M.Si. yang mengizinkan saya untuk mengambil data penelitian untuk tesis ini;
5. H. Ahmad Muzani dan Anies Baswedan, Ph.D. yang telah banyak membantu selama saya menempuh kuliah;
6. Teman-teman satu angkatan di Magister Sains Psikologi Sosial UI M. Zein Permana, Melati Putri Pertiwi, Rahmat Kurniawan, dan Sukma Nurmala;
7. Istri saya Shofiana Brahmayanti dan anak saya Asfandiar Adhfar yang telah memberi motivasi dan inspirasi selama saya menulis tesis ini.

Semoga Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 30 Desember 2014

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abu Bakar Fahmi

NPM : 1206297661

Program Studi : Psikologi, Program Pascasarjana

Fakultas : Psikologi

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Kelas Sosial dan Penilaian Keadilan Prosedural”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 30 Desember 2014

Yang menvatakan,



Abu Bakar Fahmi

ABSTRAK

Nama : Abu Bakar Fahmi
Program Studi : Psikologi, Program Pascasarjana
Judul : Kelas Sosial dan Penilaian Keadilan Prosedural

Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa persepsi orang terhadap kelas sosialnya di masyarakat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kognisi sosial. Dalam penelitian ini, kami menguji hipotesis bahwa persepsi orang terhadap kelas sosialnya mempengaruhi penilaian atas keadilan prosedural di mana orang yang berada pada tingkat kelas sosial atas lebih peka penilaian keadilan proseduralnya berkenaan dengan prosedur pengambilan keputusan baik adil maupun tidak adil; dan orang yang berada pada tingkat kelas sosial bawah lebih peka penilaian keadilan proseduralnya saat orang lain mendapat prosedur pengambilan keputusan yang tidak adil. Kami melakukan dua studi dengan memanipulasi kelas sosial subjektif relatif partisipan dan meminta mereka membayangkan berada dalam kondisi adil atau tidak adil baik untuk diri sendiri (studi 1) maupun orang lain (studi 2). Hasilnya menunjukkan bahwa manipulasi kelas sosial subjektif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural. Dibandingkan dengan partisipan yang berada dalam kondisi kelas sosial bawah, partisipan yang berada dalam kondisi kelas sosial atas tidak menunjukkan kepekaan yang lebih besar dalam penilaian keadilan prosedural baik saat berada pada prosedur *voice* maupun *no-voice* (Studi 1). Dibandingkan dengan partisipan yang berada dalam kondisi kelas sosial bawah, partisipan yang berada dalam kondisi kelas sosial atas tidak menunjukkan kepekaan yang lebih besar saat berada pada prosedur tidak akurat (Studi 2).

Kata kunci:

Kelas sosial, kelas sosial subjektif, penilaian keadilan prosedural, prosedur pengambilan keputusan, *voice/no-voice*, akurat/tidak akurat

ABSTRACT

Name : Abu Bakar Fahmi

Study Program : Psychology, Graduate Program

Title : Social Class and Procedural Justice Judgment

Recent studies suggest that individual perceptions of his own social class in society influence many aspect in life, including social cognition. In the present study, we tested the hypotheses that perceptions of social class influence procedural justice judgment where upper-class rank individuals would be more sensitive to procedural justice judgment in the matter of decision making procedur either fair or unfair; and lower-class individuals would be more sensitive to procedural justice judgment when others get unfair of decision making procedure. We conducted two studies by manipulating participant's relative social class and asked them to imagine being in fair or unfair condition either for themselves (study 1) or others (study 2). Results revealed that manipulated subjective social class did not significantly influence procedural justice judgment. Compared with participants in lower class condition, participants in upper class condition did not reveal more sensitive to procedural justice judgment either in voice or no-voice procedure (Studi 1). Compared with participants in upper class condition, participants in lower class condition did not reveal more sensitive to procedural justice judgment when they were in unaccurate procedure (Studi 2).

Keywords:

Social class, subjective social class, procedural justice judgment, decision making procedure, voice/no-voice, accurate/unaccurate

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pertanyaan Penelitian	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Keadilan Prosedural	10
2.1.1 Prosedur Pengambilan Keputusan: Aspirasi (<i>Voice</i>)	12
2.1.2 Prosedur Pengambilan Keputusan: Akurasi (<i>Accuracy</i>)	15
2.1.3 Penilaian Keadilan Prosedural	16
2.1.4 Motif dalam Penilaian Keadilan Prosedural	17
2.2. Kelas Sosial	19
2.2.1. Pengertian dan Pengukuran Kelas Sosial	20
2.2.2. Kelas Sosial, Budaya, dan Kognisi	22
2.2.3. Karakteristik Kelas Sosial	25
2.2.3.1. Konsep tentang diri	25
2.2.3.2. Pola relasi dengan orang lain	26
2.3. Kelas Sosial dan Penilaian atas Keadilan	28

2.4. Hubungan antara Kelas Sosial dan Penilaian Keadilan Prosedural	30
2.5. Hipotesis Penelitian	32
2.6. Penelitian Ini	32

BAB 3 STUDI 1

3.1. Metode	34
3.1.1. Partisipan dan Desain	34
3.1.2. Variabel dan Pengukuran	35
3.1.2.1. <i>Dependent Variable</i> (DV) : Penilaian Keadilan Prosedural	36
3.1.2.2. <i>Independent Variable</i> (IV) 1: Kelas Sosial Subjektif	34
3.1.2.3. <i>Independent Variable</i> (IV) 2: Prosedur Pengambilan Keputusan	38
3.1.3. Prosedur Penelitian	40
3.2. Hasil	41
3.2.1. <i>Manipulation Check</i>	41
3.3.2. Kepekaan Penilaian Keadilan Prosedural yang Dialami Diri Sendiri	41

BAB 4 STUDI 2

4.1. Metode	45
4.1.1. Partisipan dan Desain	45
4.1.2. Variabel dan Pengukuran	46
4.1.2.1. <i>Dependent Variable</i> (DV)	46
4.1.2.2. <i>Independent Variable</i> (IV)	46
4.1.3. Prosedur Penelitian	47
4.2. Hasil	48
4.2.1. <i>Manipulation Check</i>	48
4.3.2. Kepekaan Penilaian Keadilan Prosedural yang Menimpa Orang Lain ..	49

BAB 5 DISKUSI, KESIMPULAN, DAN SARAN

5.1. Diskusi 52
5.2. Kesimpulan 56
5.3. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Gambaran Partisipan dan Kondisi Berdasarkan Variabel Penelitian	35
Tabel 3.2	Hasil <i>Independent Sampe t-test</i> Kelas Sosial Subjektif Berdasarkan Manipulasi Kelas Sosial	41
Tabel 3.3	Hasil <i>Two-Way ANOVA</i> Memprediksi Skala Pengecekan Prosedur berdasarkan Kelas Sosial dan Prosedur	42
Tabel 3.4	Hasil <i>Independent Sampe t-test</i> Penilaian Keadilan Prosedural pada Kondisi Voice, No-Voice, dan Keseluruhan	43
Tabel 3.5	Hasil Analisis Regresi yang Memprediksi Penilaian Keadilan Prosedural pada Prosedur <i>Voice/No-Voice</i>	44
Tabel 4.1	Gambaran Partisipan dan Kondisi Berdasarkan Variabel Penelitian	46
Tabel 4.2	Hasil <i>Independent Sampe t-test</i> Kelas Sosial Subjektif Berdasarkan Manipulasi Kelas Sosial	48
Tabel 4.3	Hasil <i>Two-Way ANOVA</i> Memprediksi Skala Pengecekan Prosedur berdasarkan Kelas Sosial dan Prosedur	49
Tabel 4.4	Hasil <i>Independent Sampe t-test</i> Penilaian Keadilan Prosedural pada Kondisi Akurat, Tidak Akurat, dan Keseluruhan	50
Tabel 4.5	Hasil Analisis Regresi yang Memprediksi Penilaian Keadilan Prosedural pada Prosedur Akurat/Tidak Akurat	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Pada Kondisi Kelas Sosial Atas dan <i>Voice</i>	A1
Lampiran 2	Instrumen Pada Kondisi Kelas Sosial Bawah dan Tidak Akurat	A2
Lampiran 3	Output Analisis Statistik	A3

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap mengurus berbagai administrasi kependudukan (misalnya KTP, SIM, kartu keluarga, dan paspor) yang butuh syarat dan prosedur tertentu untuk mendapatkannya. Pembuatan paspor merupakan urusan administratif yang banyak dibutuhkan orang dari berbagai kelas sosial yang berbeda di masyarakat, baik oleh calon TKI maupun pengusaha multinasional, dan melewati prosedur yang cukup rumit, baik seleksi dokumen maupun wawancara. Pada 28 Maret 2014, sejumlah pemohon pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Karawang memprotes praktek permainan nomor antrian di kantor tersebut. Pasalnya, petugas yang melakukan pemotretan berbuat curang dengan mendahulukan pemohon yang bernomor antrian lebih besar padahal banyak pemohon yang nomor antriannya lebih kecil belum dipanggil. Ada beberapa pemohon yang dipanggil petugas pemotretan hanya dengan menyebut namanya, bukan nomor antrian, dan diketahui ternyata nomor antriannya lebih besar dari para pemohon yang belum dipanggil. Itu yang membuat sejumlah pemohon melakukan aksi protes dengan memarah-marahi para petugas di kantor tersebut (Khumaini, 2014).

Peristiwa seperti yang terjadi di atas kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Orang melakukan aksi protes karena memandang ada prosedur yang tidak adil yang diberlakukan kepada mereka. Dalam hal ini, saya banyak menemukan bahwa orang dari kelas sosial atas lebih cenderung melakukan aksi protes saat mengalami ketidakadilan prosedur yang diberlakukan kepada mereka dibandingkan orang dari kelas sosial bawah. Sementara, orang dari kelas sosial bawah cenderung menerima, bahkan diam, saat mendapatkan ketidakadilan prosedur yang diberlakukan kepadanya. Misalnya, saat mengalami ketidakadilan prosedur dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, orang dari kelas sosial bawah cenderung diam saja (Anna, 2012). Dengan kata lain, berdasarkan kejadian sehari-hari, ada kecenderungan orang dari kelas sosial atas lebih peka dibandingkan

dengan orang dari kelas sosial bawah saat dirinya mengalami ketidakadilan prosedur.

Orang peduli terhadap keadilan dan setiap orang punya sensitivitas tertentu terhadap perlakuan adil atau tidak adil yang diterimanya (Tyler, 2012). Orang akan bereaksi terhadap situasi di sekitarnya dengan menilai apakah dirinya telah diperlakukan adil atau tidak adil. Adil atau tidaknya perlakuan yang didapat oleh seseorang berpengaruh terhadap persepsi, sikap, emosi, dan tingkah lakunya (Tyler, 2012; Van Prooijen, 2013). Aksi protes sejumlah pemohon paspor pada kasus di atas menunjukkan bahwa perlakuan tidak adil terhadap mereka mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakannya.

Penilaian orang terhadap keadilan salah satunya berkaitan dengan alokasi hasil yang diperoleh. Orang ingin memperoleh keadilan dalam mendapatkan hasil. Seorang karyawan dengan beban kerja yang besar akan menilai ada keadilan jika ia mendapat porsi gaji yang besar juga. Keadilan terkait alokasi hasil ini disebut dengan keadilan distributif (Lind & Tyler, 1988). Namun, keadilan juga dinilai dari bagaimana prosedur tertentu diterapkan dalam suatu pengambilan keputusan. Keadilan terkait prosedur yang diterapkan dalam proses pengambilan keputusan dan perlakuan yang diterima selama proses tersebut disebut dengan keadilan prosedural (Lind & Tyler, 1988; Blader & Tyler, 2003). Penelitian awal tentang keadilan prosedural menunjukkan kuatnya pengaruh prosedur yang diberlakukan terhadap penilaian orang atas keadilan. Suatu perselisihan yang diselesaikan dengan prosedur yang memberi kesempatan orang menyampaikan pendapatnya dipandang lebih adil dibanding jika tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan jika hasil (*outcome*) yang diperoleh sedikit (Lind & Tyler, 1988). Prosedur pengambilan keputusan yang memberi kesempatan orang untuk menyampaikan pandangannya (*voice*) dianggap lebih adil (Folger, 1977; Thibaut & Walker, 1978). Prosedur lain yang juga penting dan menjadi pertimbangan orang dalam menilai keadilan adalah keakuratan informasi. Orang akan memandang adil terhadap suatu pengambilan keputusan yang mempertimbangkan informasi yang akurat dan terhindar dari bias (Lind & Tyler, 1988).

Dalam masyarakat, baik secara eksplisit maupun implisit, terdapat hirarki sosial yang menempatkan orang pada kelas sosial tertentu (Fiske, 2010). Tingkat

kekayaan, status pekerjaan, riwayat pendidikan, dan latar belakang keluarga atau keturunan seseorang menentukan posisinya di masyarakat. Selama proses interaksi sosial, orang menampilkan simbol-simbol tertentu yang menunjukkan kepemilikan sumber dayanya. Misalnya, punya pekerjaan kantoran membuat orang harus berbaju rapi. Berbagai simbol yang ditampilkan seseorang atas sumber daya yang dimiliki menjadi sinyal yang akan digunakan orang lain untuk menilai kelas sosial orang tersebut. Adanya proses sinyal sosial inilah yang membuat orang terbagi dalam kelas sosial yang berbeda (Kraus, Piff, & Keltner, 2011). Karena orang cenderung berinteraksi dengan orang lain yang punya latar belakang yang sama, sinyal yang ditampilkan seseorang menarik orang-orang yang punya kesamaan dengannya dalam kepemilikan sumber daya dan pada akhirnya menciptakan perbedaan kelas sosial.

Kelas sosial lebih dipandang sebagai fenomena budaya pada suatu masyarakat, oleh karena itu kajian kelas sosial telah lebih dahulu berkembang dalam ilmu sosiologi (Kraus & Stephens, 2012). Meski demikian, kajian tentang kelas sosial kini telah mendapat tempat dalam psikologi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelas sosial merupakan variabel penting: perbedaan kelas sosial menimbulkan adanya perbedaan kecenderungan dan karakteristik psikologis tertentu (Kitayama, Duffy, & Uchida, 2007). Keberadaan seseorang dalam kelas sosial tertentu di masyarakat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya (Kraus, et al, 2011; Kraus, Piff, Mendoza-Denton, Rheinschmidt, & Keltner, 2012; Kraus, Tan, & Tannenbaum, 2013). Penilaian orang terhadap keadilan merupakan fenomena kognisi sosial yang kemungkinan dipengaruhi oleh keberadaannya dalam kelas sosial tertentu. Ini yang ingin saya ketahui, yakni bagaimana keberadaan kelas sosial seseorang mempengaruhi penilaiannya atas keadilan.

Ilmu psikologi memandang kelas sosial (*socioeconomic status/SES*) berdasarkan kekayaan materi (pendapatan) dan sumber daya yang dimiliki seseorang (pekerjaan dan pendidikan; Oakes & Rossi, 2003) dan juga persepsinya terhadap tingkatan kelas sosial-ekonomi dirinya dibanding orang lain di masyarakat (Adler, Epel, Castellazzo, & Ickovics, 2000). Kemajuan kajian kelas sosial dalam psikologi didukung oleh perkembangan alat ukur kelas sosial

subjektif (SES subjektif, Adler, et al, 2000; Goodman, Adler, Kawachi, Frazier, Huang, & Colditz, 2001). SES subjektif ini didasarkan atas persepsi seseorang tentang tingkatan kelas sosial dirinya di masyarakat. SES subjektif menjadi variabel tersendiri yang berbeda dan terlepas dari SES objektif, yakni kelas sosial yang diukur berdasarkan tingkat pendapatan, strata pendidikan, dan status pekerjaan.

Berbagai penelitian psikologi tentang kelas sosial menunjukkan bahwa kelas sosial seseorang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan fisik dan psikologis (Adler, et al, 2000), kognisi sosial (Kraus, Piff, & Keltner, 2009), perilaku interpersonal (Piff, Kraus, Côté, Cheng, & Keltner, 2010), perilaku nonverbal (Kraus & Keltner, 2009), dan etika sosial (Piff et al, 2012). Orang dari kelas atas dan orang dari kelas bawah menunjukkan karakteristik yang berbeda terkait aspek-aspek kehidupan tersebut.

Saya tertarik mengetahui bagaimana kelas sosial seseorang mempengaruhi penilaian keadilan prosedural saat ia dihadapkan pada prosedur pengambilan keputusan tertentu. Sejauh pengetahuan saya, belum ada penelitian yang menguji bagaimana pengaruh kelas sosial seseorang terhadap penilaiannya atas keadilan prosedural. Penelitian tentang kelas sosial dan keadilan yang dilakukan oleh Kraus dan Keltner (2013) menguji sejauh mana kelas sosial mempengaruhi seseorang dalam memilih cara memberikan hukuman. Pada penelitian mereka, orang dari kelas sosial bawah lebih memandang pentingnya rehabilitasi atas orang yang melanggar hukuman (keadilan restoratif) dibanding orang dari kelas sosial atas. Sementara Kraus dan Keltner (2013) lebih memandang keadilan dengan bagaimana partisipan memilih cara memberi hukuman, saya lebih memandang pentingnya keadilan prosedural yang dialami oleh partisipan. Keadilan prosedural berperan penting dalam kajian tentang keadilan karena orang lebih mengutamakan prosedur yang adil lebih daripada hasil (*outcome*) yang diperoleh (Tyler, 2012). Karena di masyarakat terdapat hirarki kelas sosial, saya berpandangan, bagaimana seseorang menilai atas perlakuan yang diterima dalam relasi interpersonal menjadi elemen penting yang mungkin dipengaruhi oleh kelas sosial.

Pada hakikatnya keadilan prosedural bersifat egosentris (Van Prooijen et al., 2008). Orang terdorong oleh kepentingan diri sendiri untuk mendapat alokasi (*outcome*, instrumental) dan perlakuan (non-instrumental) yang positif. Van Prooijen dan koleganya (2008) menemukan bahwa orang dengan orientasi nilai sosial *proself* (lebih mengutamakan alokasi dan perlakuan yang positif buat dirinya sendiri) lebih peka terhadap adil atau tidaknya prosedur pengambilan keputusan yang diterapkan dibandingkan orang yang orientasinya prososial (hasil dan perlakuan sama antara diri sendiri dan orang lain). Dibandingkan dengan orang prososial, orang *proself* lebih besar penilaian keadilan proseduralnya jika prosedur yang digunakan adil; sebaliknya, jika prosedur yang digunakan tidak adil, orang *proself* lebih kecil penilaian keadilan proseduralnya.

Dibandingkan dengan orang kelas sosial bawah, orang kelas sosial atas cenderung lebih individualistik, juga lebih menekankan otonomi dan kebebasan individual (Triandis & Gelfand, 2012). Dalam penelitian kelas sosial, kecenderungan mengutamakan kepentingan diri lebih merupakan karakteristik orang kelas sosial atas daripada orang kelas sosial bawah. Partisipan dari kelas sosial atas menunjukkan tingkah laku yang kurang dermawan dengan lebih sedikit jumlah pemberiannya dalam permainan *dictator game* dan lebih sedikit (saat ditanya) alokasi gaji yang akan disumbangkan (studi 1 dan 2, Piff, Kraus, Côté, Cheng, & Keltner, 2010). Dibanding kelas bawah, partisipan dari kelas atas lebih tinggi perasaan bahwa dirinya lebih berhak dibanding orang lain (*entitlement*, Piff, 2014).

Penelitian van Prooijen dan Zwenk (2009) menguatkan sifat egosentris dalam keadilan prosedural. Mereka menemukan bahwa partisipan dengan *self-construal* yang tinggi (diaktivasi menggunakan kata ganti orang pertama tunggal) cenderung lebih peka dalam menilai adil tidaknya suatu prosedur pengambilan keputusan dibanding partisipan dengan *self-construal* yang rendah. Sifat egosentris ini mungkin sejalan dengan kecenderungan orang dari kelas atas yang lebih berfokus pada diri sendiri. Partisipan dari kelas sosial atas lebih menampilkan perilaku nonverbal yang rendah keterlibatannya dengan orang lain saat melakukan interaksi sosial (seperti memantaskan baju dan menggambar corat-coret, Kraus & Keltner, 2009).

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa ada kemungkinan orang dari kelas sosial atas lebih peka dalam menilai keadilan prosedural dibandingkan dengan orang dari kelas sosial bawah. Orang kelas sosial atas lebih menunjukkan sifat egosentris yang membuat mereka lebih peka dalam memandang keadilan prosedural.

Namun, jika perlakuan adil dan tidak adil itu menimpa orang lain, apakah orang dengan kelas sosial atas juga lebih peka dalam memandang keadilan prosedural dibanding orang kelas sosial bawah? Penilaian keadilan dipengaruhi oleh dua motif, yakni motif individual dan motif sosial (Van Prooijen, 2013). Jika penilaian keadilan didasarkan pada motif individual, suatu pengambilan keputusan akan dinilai adil bila memberi keuntungan buat diri sendiri. Sebaliknya, jika penilaian keadilan didasarkan pada motif sosial, suatu pengambilan keputusan akan dinilai adil bila bersifat egaliter, memberi keharmonisan bersama, dan memberi kebaikan buat orang lain.

Beberapa penelitian tentang kelas sosial mengindikasikan adanya kecenderungan motif keadilan yang berbeda antara orang dari kelas sosial atas dan orang dari kelas sosial bawah. Penelitian yang dilakukan oleh Kraus, Piff, dan Keltner (2009) menemukan bahwa orang dari kelas sosial bawah lebih menunjukkan perhatian yang besar kepada lingkungan sekitar dibandingkan orang dari kelas sosial atas. Dibanding kelas sosial atas, partisipan dari kelas sosial bawah lebih menggunakan penjelasan yang bersifat kontekstual dalam menghadapi keadaan lingkungan yang mengancam, baik kesenjangan sosial yang dialami maupun apa yang telah dicapai dalam berbagai aspek kehidupan.

Penelitian yang dilakukan Kraus dan Keltner (2009) menunjukkan bahwa partisipan dari kelas sosial bawah lebih menampilkan tingkah laku yang berorientasi orang lain saat berinteraksi dengan orang yang baru ditemuinya. Ini mungkin sejalan dengan temuan bahwa orang kelas bawah lebih egaliter dibanding orang kelas atas. Partisipan dari kelas sosial bawah lebih menunjukkan orientasi egaliter yang membuatnya lebih bertindak prososial (studi 3, Piff, et al., 2010). Orang dari kelas sosial bawah juga memiliki kemampuan empati yang lebih tinggi dibandingkan orang dari kelas sosial atas. Partisipan dari kelas sosial bawah lebih memiliki kemampuan dalam menilai emosi dan lebih mampu menilai

emosi orang yang berinteraksi dengannya dibanding partisipan dari kelas atas (studi 1 dan 2, Kraus, et al., 2010).

Sejalan dengan kemampuannya berempati, orang dari kelas sosial bawah lebih tinggi dalam welas asih (*compassion*), yakni emosi yang menunjukkan kepedulian pada orang lain dan berkeinginan untuk membantu mengatasi penderitaan orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Stellar dan koleganya (2011) menunjukkan, dibanding partisipan dari kelas atas, partisipan dari kelas bawah menampilkan tingkat welas asih yang tinggi baik saat diuji melalui *self-report* maupun selama berinteraksi dengan orang lain.

Sementara itu, terkait bagaimana seseorang menilai keadilan atau ketidakadilan prosedural yang menimpa orang lain, Van Prooijen dan koleganya (2012) menunjukkan bahwa penilaian orang atas keadilan prosedural dipengaruhi oleh orientasi sosialnya, apakah *proself* atau prososial. Partisipan dengan orientasi *proself* lebih menunjukkan perhatian pada adil atau tidaknya prosedur yang diterapkan bagi dirinya dibanding partisipan dengan orientasi prososial. Sedangkan partisipan dengan orientasi prososial lebih memandang pentingnya kesamaan (*equality*) antara dirinya dan orang lain dalam prosedur yang digunakan, bahkan jika prosedur tersebut tidak adil buat dirinya dan orang lain.

Dengan adanya temuan bahwa orang yang berorientasi prososial lebih mengutamakan kesamaan (*equality*) prosedur antara dirinya dan orang lain, saya berpandangan bahwa orang dari kelas sosial bawah, yang lebih memiliki motif-motif sosial (orientasi lingkungan dan orang lain, egaliter, empati, dan welas asih), akan lebih menunjukkan kepekaan yang tinggi saat mengetahui ada prosedur yang tidak adil yang dialami orang lain.

Maka, saya menduga bahwa ada pengaruh perbedaan kelas sosial seseorang dalam menilai keadilan prosedural. Dibanding orang dari kelas sosial bawah, orang dari kelas sosial atas akan cenderung lebih peka terhadap keadilan prosedural yang menimpa dirinya, baik mendapat prosedur yang adil maupun tidak adil. Sementara, dibanding orang dari kelas sosial atas, orang dari kelas sosial bawah akan cenderung lebih peka terhadap prosedur yang tidak adil yang menimpa orang lain.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah kelas sosial seseorang berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural?
- b. Apakah orang dari kelas sosial atas memiliki kepekaan yang lebih besar dalam penilaian keadilan prosedural saat dirinya mengalami prosedur pengambilan keputusan yang adil maupun tidak adil?
- c. Apakah orang dari kelas sosial bawah memiliki kepekaan yang lebih besar dalam penilaian keadilan prosedural saat orang lain mengalami prosedur pengambilan keputusan yang tidak adil?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kelas sosial terhadap penilaian keadilan prosedural. Saya ingin mengetahui bagaimana penilaian keadilan prosedural seseorang saat menghadapi prosedur pengambilan keputusan dipengaruhi oleh keberadaan kelas sosialnya. Penelitian ini diharapkan bisa menunjukkan bahwa keberadaan kelas sosial seseorang mempengaruhi kognisi sosialnya, dalam hal ini penilaiannya atas prosedur pengambilan keputusan, baik yang dialami diri sendiri maupun orang lain. Saat diri sendiri menghadapi prosedur pengambilan keputusan, baik adil maupun tidak adil, orang dari kelas sosial mana yang lebih menunjukkan kepekaan penilaian keadilan proseduralnya. Ingin diketahui pula, orang dari kelas sosial mana yang lebih peka terhadap penilaian keadilan prosedural saat prosedur yang tidak adil dialami oleh orang lain.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan dibagi dalam lima bab dengan penjelasan sebagai berikut. Bab pertama berisi tentang latar belakang yang melandasi pentingnya melakukan penelitian tentang pengaruh kelas sosial terhadap penilaian keadilan prosedural. Pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan dituang dalam bab ini.

Pada bab kedua, saya membahas tinjauan teoritis terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yakni penilaian keadilan prosedural, kelas sosial, dan prosedur pengambilan keputusan. Pada bab ini dipaparkan pula hipotesis penelitian. Pada bab ketiga dan keempat, saya membahas tentang studi yang saya lakukan, mencakup tentang metode dan hasil penelitian. Metode penelitian mencakup desain penelitian, variabel-variabel yang digunakan dan definisinya, alat ukur yang digunakan, partisipan yang dilibatkan, dan prosedur penelitian. Sedangkan hasil penelitian mencakup *manipulation check* dan pengujian hipotesis secara statistik. Dan pada bab kelima peneliti menjelaskan hasil temuan, jawaban dari pertanyaan penelitian, diskusi hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keadilan Prosedural

Orang pada hakikatnya punya kepedulian atas keadilan (Tyler 2012). Orang akan menunjukkan reaksi tertentu atas keadilan atau ketidakadilan yang menimpa dirinya atau orang lain. Bagaimana orang berpikir, merasa, dan bertindak dalam berbagai keadaan dipengaruhi oleh penilaian apakah sesuatu itu adil atau tidak adil (Tyler & Smith, 1995). Misalnya seorang pegawai akan mendukung kebijakan perusahaannya jika ia mendapat perlakuan adil, atau sebaliknya, akan protes jika mendapat perlakuan tidak adil. Penilaian orang apakah sesuatu itu adil atau tidak adil berbeda-beda, entah itu menimpa diri sendiri atau orang lain. Misalnya, jika ada seorang pegawai yang mendapat perlakuan tidak adil dari perusahaan, mungkin kawan-kawannya akan menunjukkan reaksi yang berbeda-beda: ada yang mendukung, ada juga yang protes terhadap perusahaan. Standar keadilan berbeda-beda tergantung realitas sosial yang dialami seseorang dan ini alasan yang membuat ilmuwan psikologi sosial tertarik mengkaji tentang keadilan (Tyler & Smith, 1995).

Ada jenis keadilan yang terkait dengan kepedulian seseorang atas hasil yang diperoleh, apakah adil atau tidak adil, ini disebut dengan keadilan distributif (Lind & Tyler, 1988). Pada keadilan jenis ini, orang melihat keadilan berdasarkan perhitungan rasio antara keuntungan dan yang diinvestasikan yang ada pada dirinya dibandingkan dengan rasio yang ada pada orang lain (Folger, 1977). Misalnya, seseorang akan memandang adil jika ia mendapat gaji sesuai dengan beban kerjanya, dengan membandingkan gaji dan beban kerja orang lain.

Ada jenis keadilan yang lain yang terkait dengan kepedulian orang atas prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan, ini dinamakan keadilan prosedural (Lind & Tyler, 1988). Dengan kata lain, orang ingin pihak yang berwenang menggunakan prosedur pengambilan keputusan secara adil. Leventhal (1980) mendefinisikan keadilan prosedural sebagai persepsi individu tentang keadilan atas komponen-komponen prosedural dalam suatu sistem sosial yang mengatur tentang proses pembagian hasil. Definisi ini, yang mengedepankan

prosedur atas pembagian hasil, tidak lepas dari perkembangan paradigma dalam kajian tentang keadilan.

Pada akhir tahun 1970an, terjadi perubahan paradigma dalam penelitian tentang keadilan, dari yang semula menekankan pentingnya keadilan distributif berubah dengan menekankan keadilan prosedural (Tyler, Boeckmann, Smith, & Huo, 1997; Sedikides, Hart, & De Cremer, 2008). Perhatiannya bukan lagi keadilan pada pembagian gaji dan bonus misalnya, tetapi pada bagaimana prosedur suatu pengambilan keputusan dibuat.

Studi yang sistematis tentang prosedur pengambilan keputusan dirintis oleh John Thibaut, Laurens Walker, dan kolega-koleganya (Thibaut & Walker 1978; Lind & Tyler, 1988). Penelitian mereka dikembangkan dari isu di bidang hukum, yakni bagaimana agar lembaga pengadilan punya otoritas dalam menyelesaikan perselisihan (Tyler, 2004). Upaya agar hasil keputusan pengadilan dapat diterima dan memuaskan pihak-pihak yang berselisih mendorong timbulnya pemikiran untuk menggunakan mediasi dan prosedur yang lain dalam menyelesaikan permasalahan. Dari penelitian merekalah pertama kali digunakan istilah keadilan prosedural untuk menjelaskan fenomena adanya efek prosedur dalam penilaian keadilan (Walker, LaTour, Lind, & Thibaut, 1974). Pada saat itu, penelitian masih menekankan pada distribusi yang adil sebagai variabel utama dalam memandang keadilan.

Penelitian awal tentang keadilan prosedural dilakukan dengan membandingkan pengadilan dengan sistem *adversary* (pihak pengadilan menjadi penengah antara penuntut dan pembela) dan sistem *inquisitory* (pihak pengadilan turut terlibat dalam investigasi) dalam menyelesaikan perselisihan (Lind & Tyler, 1988). Partisipan memandang pengadilan dengan sistem *adversary* lebih adil dibanding pengadilan dengan sistem *inquisitory*.

Setidaknya ada tiga isu dalam penelitian yang dilakukan oleh Thibaut dan Walker (Tyler, et al., 1997). Pertama, orang yang berselisih cenderung menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam hal ini, kendali (*control*) atas penyelesaian konflik ditentukan oleh pihak ketiga. Ada dua macam kendali, yakni kendali atas keputusan dan kendali atas proses (Thibaut & Walker, 1978). Kendali atas keputusan diukur berdasarkan sejauh mana pihak-

pihak yang berselisih memiliki kesamaan dalam menentukan hasil (*outcome*) atau kesepakatan. Kendali atas proses mengacu pada pengembangan dan pemilahan informasi yang akan menjadi dasar dalam penyelesaian masalah. Kedua, prosedur pengadilan yang menggunakan sistem *adversary* dipandang lebih adil dibandingkan dengan sistem *inquisitory*, terutama terkait upaya mengumpulkan fakta-fakta dan mengurangi bias. Ketiga, terkait dengan reaksi subjektif orang atas prosedur, orang akan lebih merasa puas jika mendapat perlakuan prosedural yang adil, terlepas dari apapun hasil (*outcome*)-nya.

Jadi, penelitian awal tentang keadilan prosedural yang dilakukan oleh Thibaut dan Walker berhasil mengungkap bahwa ada keadilan lain yang juga penting selain keadilan distributif, yakni keadilan prosedural. Penelitian tersebut juga memandang pentingnya kendali atas proses, yakni bahwa suatu prosedur pengambilan keputusan dipandang adil jika melewati proses pemilahan informasi yang menjadi dasar suatu keputusan. Setidaknya ada dua prosedur pengambilan keputusan yang memenuhi kaidah kendali proses, yakni aspirasi (*voice*) dan akurasi.

2.1.1. Prosedur Pengambilan Keputusan: Aspirasi (*Voice*)

Suatu prosedur pengambilan keputusan akan dinilai adil jika pihak-pihak yang terlibat diberi kesempatan dalam memberikan informasi yang relevan dengan keputusan yang akan diambil. Ini dinamakan dengan efek kendali proses (*process control effect*, Thibaut & Walker, 1978). Sejalan dengan pandangan ini, suatu prosedur pengambilan keputusan akan dinilai adil jika pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Ini dinamakan efek aspirasi (*voice effect*, Folger, 1977). Sejumlah penelitian, baik dilakukan secara alamiah maupun di laboratorium menunjukkan bahwa adanya aspirasi (*voice*) bisa meningkatkan keadilan prosedural bahkan jika orang yang mendapat aspirasi tersebut tidak punya kendali langsung atas keputusan itu sendiri (Folger, 1977; Lind, Kanfer, & Earley, 1990).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Folger (1977), 80 anak laki-laki terlibat dalam simulasi tugas kantor. Di antara mereka ada yang berperan sebagai

pekerja dan ada yang berperan sebagai manager. Manager akan memberikan sejumlah bayaran tertentu kepada pekerja selama tugas kerja berlangsung. Peneliti menetapkan jumlah bayaran tertentu yang akan dibagikan oleh manager untuk diri manager sendiri dan untuk pekerja. Ada beberapa kali pembayaran yang dilakukan oleh manager kepada pekerja. Rancangan eksperimen dimanipulasi dengan mempertimbangkan *outcome* (sama/*equity* atau tidak sama/*inequity*), prosedur (tidak ada aspirasi dan ada aspirasi), dan urutan pembayaran (konstan dan makin meningkat). Pada kondisi ada aspirasi, pekerja boleh menentukan jumlah pembagian uang yang mereka nilai adil untuk diusulkan kepada manager, sedang pada kondisi tidak ada aspirasi (*mute*) pekerja tidak diperkenankan mengungkapkan apapun kepada manager. Pengukuran keadilan prosedural dilakukan dengan menanyakan kepada partisipan yang berperan sebagai pekerja, “Seberapa adil manager membagikan uangnya?” Baik saat mendapat perlakuan pembayaran yang sama (*equity*) maupun tidak sama (*inequity*), juga saat mendapat perlakuan pembayaran yang konstan maupun meningkat, penilaian keadilan prosedural partisipan yang berada pada kondisi ada aspirasi lebih tinggi dibandingkan pada kondisi tidak ada aspirasi. Jadi, adanya aspirasi meningkatkan penilaian orang atas keadilan prosedural.

Orang memandang penting adanya aspirasi (*voice*) dalam suatu proses pengambilan keputusan. Ada dua proses penting yang dilalui saat seseorang mendapat kesempatan menyampaikan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan, yakni proses yang bersifat instrumental dan non-instrumental (Lind & Tyler, 1988). Pada proses instrumental, seseorang memandang penting aspirasi karena dengannya ia bisa menyampaikan pandangannya yang dapat dipertimbangkan oleh pengambil keputusan dan berpengaruh terhadap hasil keputusan (*outcome*). Proses non-instrumental berarti bahwa adanya aspirasi dalam proses pengambilan keputusan membuat seseorang merasa diperlakukan dengan baik dan terhormat oleh pengambil keputusan.

Berdasarkan pertimbangan ini, Lind dan Tyler (1988) menyebut dua macam model keadilan prosedural, yakni model kepentingan pribadi (*self-interest*) dan model nilai kelompok (*group-value*). Model kepentingan pribadi berarti bahwa orang cenderung ingin memperoleh keuntungan setinggi-tingginya

sehingga berusaha untuk mempengaruhi keputusan. Jadi adanya aspirasi (*voice*) bisa mempengaruhi keputusan dan pada akhirnya mempengaruhi hasil yang mereka peroleh. Sedangkan model nilai kelompok berarti orang memandang penting keanggotaannya dalam suatu kelompok. Berdasarkan model ini, aspirasi berfungsi sebagai ekspresi nilai (*value-expressive*) karena orang diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebagai bentuk partisipasi dalam proses kelompok, tanpa memandang penting hasil yang diperoleh.

Pandangan bahwa adanya aspirasi dalam proses pengambilan keputusan berpengaruh baik instrumental maupun noninstrumental ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lind dan koleganya (Lind, et al., 1990). Sejumlah 180 mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini mendapat tugas untuk menyusun jadwal kuliah. Ada tiga kondisi terkait prosedur: aspirasi diberikan sebelum keputusan (*predecision voice*), aspirasi diberikan setelah keputusan (*postdecision voice*), dan tanpa aspirasi (*no-voice*). Pada kondisi aspirasi diberikan sebelum keputusan, partisipan diberikan kesempatan untuk berpikir bagaimana sebaiknya jadwal kuliah disusun. Peneliti meminta partisipan menyampaikan pandangannya terkait tugas tersebut. Setelah mendengar pandangan partisipan, peneliti menyusun jadwal kuliah. Pada kondisi aspirasi diberikan setelah keputusan, peneliti menyampaikan bahwa jadwal kuliah telah disusun dan tidak akan diubah. Akan tetapi peneliti tertarik untuk mengetahui pandangan partisipan dan meminta mereka menyampaikan pendapatnya tentang jadwal yang telah disusun. Pada kondisi tidak ada aspirasi, peneliti mengumumkan jadwal kuliah tanpa menanyakan kepada partisipan sebelum ataupun sesudah jadwal itu ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipan dalam kondisi mendapat aspirasi baik sebelum atau sesudah pengambilan keputusan menilai prosedur yang diterapkan lebih adil dibandingkan partisipan pada kondisi tidak ada aspirasi. Sementara partisipan pada kondisi mendapat aspirasi sebelum pengambilan keputusan menunjukkan penilaian keadilan prosedural yang lebih tinggi dibanding partisipan pada kondisi mendapat aspirasi setelah pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa adanya aspirasi berpengaruh baik secara instrumental maupun non-instrumental. Pada kondisi partisipan mendapat aspirasi sebelum pengambilan keputusan, aspirasi bersifat instrumental karena berpengaruh

terhadap hasil keputusan, sementara pada kondisi partisipan mendapat aspirasi sesudah pengambilan keputusan, aspirasi bersifat non-instrumental karena tidak berpengaruh terhadap hasil keputusan.

2.1.2. Prosedur Pengambilan Keputusan: Akurasi (*Accuracy*)

Penelitian awal dalam keadilan prosedural menekankan pada adanya kendali atas keputusan, yakni melalui aspirasi. Selain aspirasi, ada prosedur-prosedur lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan penilaian atas keadilan. Peneliti berikutnya memberikan pandangan yang lebih luas dengan menekankan aturan-aturan lain yang mempengaruhi prosedur. Leventhal (1980) mengungkapkan ada 6 (enam) aturan keadilan, yakni konsistensi, penghilangan-bias (*bias-suppression*), akurasi, bisa diperbaiki (*correctability*), keterwakilan (*representativeness*), dan keetisan. Konsistensi berarti adanya perlakuan yang sama pada setiap orang sepanjang waktu. Penghilangan-bias berarti menghindari kepentingan pribadi (*self-interest*) dan bias personal. Akurasi berarti menggunakan informasi yang akurat. Bisa diperbaiki berarti ada kemungkinan bagi pihak yang berwenang untuk memperbaiki keputusan. Keterwakilan berarti memberi kesempatan kepada semua orang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Dan keetisan berarti sesuai dengan moral dasar dan nilai etis yang berlaku.

Di antara 6 aturan tersebut, ada 4 aturan yang dianggap paling penting dalam mempengaruhi penilaian atas keadilan prosedural, yakni konsistensi, keetisan, penekanan bias, dan akurasi (Barret-Howard & Tyler, 1986). Masing-masing kriteria memiliki tujuan yang berbeda-beda. Akurasi berkaitan dengan terciptanya produktivitas. Penghilangan-bias dan keetisan berkaitan dengan terciptanya keharmonisan. Sedangkan konsistensi berkaitan dengan peningkatan produktivitas sekaligus juga harmoni.

Dalam penelitian, (misalnya Vermunt, et al., 1996; Van Proijen, et al., 2002), manipulasi akurasi dilakukan dengan menghilangkan item-item yang seharusnya dipertimbangkan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini ada keakuratan yang dilanggar yang seharusnya menjadi tumpuan dalam menentukan *outcome* dalam suatu pengambilan keputusan (Leventhal, 1980). Akurasi menjadi prosedur alternatif selain prosedur *voice/no voice* yang

telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian tentang keadilan prosedural (Van Prooijen, et al., 2012). Dalam penelitian ini, manipulasi akurasi secara teknis memungkinkan partisipan melakukan penilaian prosedur saat berada dalam kondisi diri sendiri maupun orang lain diperlakukan secara adil (akurat) atau tidak adil (tidak akurat).

Sebuah penelitian ingin mengetahui bagaimana efek akurasi terhadap penilaian keadilan prosedural saat peneliti mengubah prosedurnya dari semula akurat menjadi tidak akurat. Mula-mula partisipan diberikan tiga kali tes yang masing-masing terdiri atas 10 item. Peneliti menilai tiga kali tes tersebut dengan akurat, yakni mempertimbangkan 10 item dalam penilaiannya. Pada tes keempat peneliti mengubah prosedur penilaian dengan hanya menilai satu dari 10 item pada kondisi tidak akurat dan 8 dari 10 item pada kondisi agak akurat. Penelitian menunjukkan partisipan pada kondisi tidak akurat menilai prosedur yang digunakan lebih tidak adil dibandingkan pada kondisi agak akurat. Juga, jika partisipan mendapat penilaian tidak akurat dibanding apa yang telah dialami sebelumnya, ia akan memiliki afek negatif dan cenderung melakukan protes (Vermunt, Wit, Van den Bos, & Lind, 1996). Pengalaman sebelumnya yang mendapat perlakuan akurat menjadi referensi partisipan dalam menilai keadilan suatu prosedur saat mendapat perlakuan yang tidak akurat.

2.1.3. Penilaian Keadilan Prosedural

Berbeda dengan agama, filsafat, sosiologi, maupun ekonomi yang menilai keadilan secara objektif, psikologi memandang keadilan sebagai masalah subjektif (Tyler, et al., 1997). Artinya setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda tentang keadilan. Apakah sesuatu itu adil atau tidak adil tergantung pada penilaian orang tersebut. Penilaian adil atau tidaknya atas apa yang dialami, termasuk prosedur yang diberlakukan oleh suatu otoritas terhadap dirinya, akan dipengaruhi oleh apa yang ia pikirkan, rasakan, dan lakukan saat berinteraksi dengan orang lain selama ini (Tyler, et al., 1997). Demikian juga sebaliknya, perlakuan keadilan prosedural yang menimpa seseorang akan berpengaruh terhadap pikiran, perasaan, dan perilakunya (Sedikides, Hart, & de Cremer, 2008).

Penilaian keadilan prosedural berarti bahwa orang tidak hanya peduli dengan keadilan dalam memperoleh keuntungan atau hasil (*outcome*), tapi orang juga menilai seberapa adil prosedur yang diterapkan dalam mendapatkan hasil (Tyler, et al., 1997). Se jauh mana seseorang menilai apakah suatu prosedur adil atau tidak adil punya konsekuensi psikologis yang luas. Penilaian keadilan prosedural berkaitan dengan aspek-aspek psikologis seperti emosi, mood, motivasi internal, kreativitas, kepuasan kerja, dan juga tingkat kepatuhan, kepercayaan dan legitimasi terhadap otoritas (Sidikides, et al., 2008).

2.1.4. Motif dalam Penilaian Keadilan Prosedural

Penilaian keadilan dipengaruhi oleh dua motif, yakni motif individualistik dan motif sosial (Van Prooijen, 2013). Motif individualistik berarti orang menilai sesuatu itu adil jika menguntungkan dirinya baik secara material maupun immaterial. Motif ini muncul dari tujuan-tujuan yang bersifat egosentris. Motif sosial berarti orang menilai sesuatu itu adil jika hal itu baik untuk orang lain. Motif ini muncul dari sikap egalitarian, keinginan untuk harmonis, dan perhatiannya terhadap kepentingan bersama.

Kedua motif ini ada saat orang menilai keadilan, tidak hanya keadilan distributif yang memang berdampak secara material dan kasat mata bagi diri dan orang lain, tapi juga keadilan prosedural yang lebih bersifat immaterial dan tidak kasat mata. Penelitian menunjukkan, partisipan akan memandang lebih buruk keadaannya jika ada sedikit ketidakadilan prosedural yang menimpa dirinya dibandingkan jika ada ketidakadilan prosedural yang besar yang menimpa orang lain (Lind, Kray & Thompson, 1998). Jadi orang lebih menganggap penting adanya ketidakadilan yang menimpa dirinya dibanding ketidakadilan yang menimpa orang lain. Pada penelitian lain, bias yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (otoritas) dalam menerapkan prosedur akan dinilai tidak adil jika bias tersebut merugikan dirinya, namun akan dinilai adil jika bias tersebut menguntungkan dirinya (Van Prooijen, Van den Bos, Lind, & Wilke, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa orang punya motif individual dalam menilai keadilan prosedural.

Adanya motif individual dalam menilai keadilan ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Van Prooijen dan koleganya (Van Prooijen, et al., 2008). Dalam suatu pengambilan keputusan, setelah dimanipulasi dengan prosedur ada aspirasi (*voice*) dan tidak ada aspirasi (*no-voice*), partisipan dengan orientasi *proself* akan lebih peka dalam menilai adil atau tidaknya prosedur yang diterapkan dibanding partisipan dengan orientasi prososial. Orang dengan orientasi *proself* dicirikan dengan kecenderungannya mengutamakan keuntungan bagi dirinya dibanding orang lain. Temuan ini muncul baik pada penelitian yang dilakukan di laboratorium maupun lapangan. Inilah yang menjadi pijakan atas pandangan bahwa keadilan prosedural pada hakekatnya bersifat egosentris.

Motif individualistik ini ditelisik oleh van Prooijen dan Zwenk (2009) dengan mencari tahu kepekaan atas prosedur keadilan dari bagaimana seseorang mendefinisikan dirinya dalam konteks sosial. Ada orang dengan konsep diri yang individual dan orang dengan konsep diri yang sosial. Dalam penelitian mereka, partisipan dalam kondisi konsep diri individual diminta menuliskan tujuh kalimat tentang 'siapa saya' dengan subjek menggunakan kata ganti pertama tunggal. Dalam kondisi konsep diri sosial, partisipan diminta menuliskan tentang 'siapa kami' dengan subjek menggunakan kata ganti pertama jamak. Setelah itu mereka dimanipulasi prosedur pengambilan keputusan, apakah diberi kesempatan (*voice*) atau tidak (*no voice*) dalam menyampaikan pendapat tentang alokasi jumlah tiket loterai untuk mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipan yang diaktivasi dengan konsep diri individualnya cenderung lebih peka dalam menilai keadilan prosedural yang diterapkan kepadanya jika dibandingkan dengan partisipan yang diaktivasi dengan konsep diri sosial. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa keadilan prosedural punya motif individualistik.

Disamping bermotif individualistik, keadilan prosedural juga bermotif sosial. Ada kondisi di mana orang tidak mementingkan dirinya tetapi lebih mengutamakan kepentingan orang lain dengan pertimbangan moral dan prinsip kesetaraan (Van Prooijen, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Van Prooijen dan koleganya (Van Prooijen, et al., 2012) ingin mengetahui apakah orang dengan orientasi *proself* atau prososial yang lebih peka dalam menilai keadilan prosedural saat mengetahui prosedur pengambilan keputusan yang diterapkan untuk dirinya

dan juga orang lain. Orang dengan orientasi *proself* lebih peka dalam menilai prosedur yang diberlakukan pada dirinya dibanding orang dengan orientasi prososial. Namun, orang dengan orientasi prososial lebih tinggi dalam menilai perlunya kesetaraan antara prosedur yang diberlakukan untuk dirinya dan orang lain, bahkan jika prosedur tersebut tidak baik untuk keduanya (partisipan sama-sama tidak diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya).

2.2. Kelas Sosial

Dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak bisa terlepas dari keberadaannya dalam kelas sosial tertentu di masyarakat. Setiap orang menduduki kelas sosial tertentu. Dan keberadaan seseorang dalam kelas sosial tertentu itu mempengaruhi identitas dirinya dan bagaimana dirinya berinteraksi dengan orang lain (Fiske & Markus, 2011). Kelas sosial seseorang mempengaruhi caranya dalam berpikir, merasa, dan berperilaku yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari (Kraus, et al., 2011).

Meskipun tema tentang kelas sosial telah dikaji secara ilmiah lebih dari seabad lalu, kajian tentang bagaimana kelas sosial mempengaruhi pengalaman psikologis seseorang masih tergolong baru (Kraus & Stephens, 2012). Kelas sosial sudah lama dikaji oleh ilmuwan sosiologi dan antropologi. Ilmuwan psikologi tergolong baru dalam melakukan konseptualisasi kelas sosial. Sementara ilmu sosial telah lama memandang kelas sosial dalam perspektif buruh, psikologi menandang kelas sosial berdasarkan perspektif psikologi kesehatan, psikologi lintas budaya, dan kognisi sosial (Kraus, et al, 2012). Kelas sosial di mana seseorang berada berkaitan dengan kesehatan fisik maupun psikologisnya. Orang kelas sosial bawah lebih rendah kesehatan fisiknya, rentan mengalami depresi, stres, dan lebih pesimis dibanding orang dari kelas sosial atas (Adler, Boyce, Chesney, Cohen, Folkman, Kahn, & Syme, 1994; Adler, et al, 2000). Dalam perspektif budaya, orang dari kelas sosial yang sama saling berbagi konteks sosial yang berpengaruh terhadap norma dan perilaku seseorang. Misalnya, orang dari kelas sosial yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan dalam minatnya terhadap seni dan musik (Snibbe & Markus, 2005). Dalam perspektif kognisi sosial, kelas sosial seseorang mempengaruhi pola kognisi sosialnya sehingga

berpengaruh terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku. Misalnya, dibanding orang kelas atas, orang kelas bawah lebih menggunakan penjelasan yang bersifat sosial atau kontekstual dalam melihat keadaan yang menimpa dirinya (Kraus, et al., 2009).

2.2.1. Pengertian dan Pengukuran Kelas Sosial

Kelas sosial didefinisikan sebagai dimensi diri yang didasarkan oleh kepemilikan objektif atas sumber daya materi (pendapatan, pendidikan, dan status pekerjaan) dan persepsi subjektif atas peringkat dirinya (dibanding dengan orang lain) di masyarakat (Cote, 2011; Kraus, et al., 2012; Kraus & Keltner, 2013). Menurut Cote (2011), kelas sosial mencerminkan representasi mental seseorang atas atribut yang melekat pada dirinya, misalnya peran sosial yang dipilih dan hubungan sosial yang dijalin. Atribut-atribut seseorang ini muncul atas kepemilikan sumber daya. Misalnya, orang kaya di suatu desa dianggap sebagai orang terpandang dan biasanya organisasi masyarakat menempatkannya sebagai pembina dalam struktur organisasi. Kondisi objektif atas kepemilikan sumber daya membangun representasi mental seseorang yang membuatnya berpikir, bersikap, dan berperilaku berdasarkan pola tertentu. Pola pikir, sikap, dan perilaku seseorang ini akan dilihat orang lain dan orang yang melihat akan mengasosiasikannya dengan kekayaan, pendidikan, dan status pekerjaan yang melekat pada seseorang itu. Adanya simbol-simbol yang dapat dilihat yang menunjukkan tingkat kekayaan, pendidikan, dan pekerjaan seseorang menjadi sinyal status sosialnya (Kraus, et al., 2011). Adanya sinyal-sinyal inilah yang membuat orang memahami ada perbedaan kelas sosial di masyarakat dan pada akhirnya menentukan bagaimana dirinya menilai tingkat kelas sosialnya sendiri di masyarakat.

Berdasarkan pengertian kelas sosial di atas, dapat dipahami bahwa kelas sosial didefinisikan dalam dua proses, yakni kondisi objektif berupa kepemilikan sumber daya (kekayaan, pendidikan, dan pekerjaan) dan kondisi subjektif berupa penilaian atas peringkatnya dalam hirarki sosial (Kraus, et al., 2012). Pada proses pertama, kelas sosial seseorang diukur dengan mencari tahu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan status pekerjaannya (Oakes & Rossi, 2003). Pada proses

ini, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan status pekerjaannya menentukan di kelas sosial mana seseorang berada.

Pendapatan merupakan pengukuran yang informatif karena bisa mengetahui bagaimana kemampuan seseorang mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari (Kraus & Stephens, 2012). Pendapatan diukur dalam skala yang membedakan orang dalam rentang pendapatan tertentu. Hanya saja, para peneliti berbeda-beda dalam menentukan rentang pendapatannya (Cote, 2011). Pendidikan dipandang sebagai pengukuran kelas sosial yang paling mendasar karena tingkat pendidikan yang tinggi bisa meningkatkan pendapatan dan mendapatkan pekerjaan yang bergengsi (Kraus & Stephens, 2012). Pendidikan diukur dalam dua pendekatan, yakni skala berkelanjutan dan membuat dikotomi. Skala berkelanjutan misalnya menetapkan kategori tingkat pendidikan pada 4 level, mulai dari 1 (sekolah menengah) sampai 4 (pascasarjana). Dikotomi misalnya membagi pendidikan dalam dua level, yakni sarjana dan nonsarjana atau lebih rendah (Cote, 2011). Sementara, pekerjaan dapat mengukur kelas sosial karena pekerjaan tertentu membawa seseorang pada pengalaman sosial dan psikologis yang tertentu pula (Kraus & Stephens, 2012). Pengukuran status pekerjaan lebih variatif tergantung pada konteks sosial, misalnya di negara mana penelitian dilakukan (Cote, 2011). Pada penelitian yang melibatkan mahasiswa, peneliti menggunakan pengukuran pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan orangtuanya untuk digunakan dalam menentukan kelas sosial partisipan.

Namun demikian, penilaian atas kepemilikan sumber daya (pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan) tergantung pada konteks sosial, yakni kepada siapa dirinya dibandingkan. Ini membuat definisi kelas sosial berdasarkan kondisi objektif jadi tidak sepenuhnya objektif. Pengukuran kelas sosial pun bersifat kompleks. Pengukuran dengan tiga kriteria tadi untuk digunakan sebagai satu alat ukur kelas sosial dianggap kurang meyakinkan. Peneliti juga sulit menentukan bagaimana membedakan kelas sosial orang yang punya sumber daya materi yang relatif sama (Kraus, et al., 2009).

Atas kelemahan tersebut, peneliti mengelaborasi definisi kelas sosial berdasarkan proses kedua, yakni bagaimana seseorang menempatkan kelas sosial dirinya dalam suatu hirarki sosial di masyarakat. Dalam hal ini peneliti

menggunakan pengukuran kelas sosial yang bersifat subjektif. Berdasarkan perspektif ini, orang mempersepsi peringkat kelas sosialnya yang pada akhirnya mempengaruhi caranya mempersepsi lingkungan sosial dan dalam berhubungan dengan orang lain (Kraus, et al., 2013).

Pengukuran kelas sosial subjektif yang paling banyak digunakan adalah *MacArthur Scale of Subjective Socioeconomic Status* (Adler, et al., 2000). Para pengukuran ini, partisipan menentukan peringkat kelas sosial dirinya di masyarakat pada sebuah tangga dengan 10 anak tangga yang menggambarkan tingkat pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan (Adler, et al., 2000; Goodman, et al., 2001). Tangga paling atas (10) menunjukkan tingkat pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan yang paling tinggi, sedang tangga paling bawah (1) menunjukkan tingkat pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan yang paling rendah.

Penelitian menggunakan alat ukur ini menunjukkan bahwa kelas sosial subjektif berperan penting dan merupakan aspek yang berbeda dengan kelas sosial objektif (Kraus, et al., 2011; Kraus & Stephens, 2012). Penelitian menunjukkan bahwa dibanding dengan kelas sosial objektif, kelas sosial subjektif partisipan lebih kuat memprediksi kesehatan fisik maupun psikologisnya (Adler, et al., 2000).

2.2.2. Kelas Sosial, Budaya, dan Kognisi

Pendekatan psikologi terhadap kelas sosial awal mulanya memandang kelas sosial sebagai bentuk budaya. Psikologi budaya memandang bahwa adanya perbedaan individu disebabkan oleh adanya proses yang berbeda yang dialami oleh individu-individu tersebut. Proses yang berbeda ini terjadi karena adanya perbedaan budaya di masyarakat (Markus & Kitayama, 2003). Individu dan budaya berinteraksi secara dinamis. Pikiran, perasaan, dan perilaku orang bisa membentuk budaya tertentu di masyarakat dan sebaliknya, budaya yang terbentuk dapat mempengaruhi orang dalam berpikir, merasa, dan berperilaku (Markus & Kitayama, 2010). Produk budaya seperti norma, nilai, gagasan, institusi, sistem sosial, kebijakan, dan benda-benda teknologi adalah buatan orang yang pada gilirannya produk budaya tersebut juga mempengaruhi bagaimana orang berpikir, merasa, dan berperilaku.

Kelas sosial adalah produk budaya, oleh karena itu kelas sosial seseorang merupakan bagian dari identitas budayanya (Kraus, et al., 2011). Identitas itu muncul dari sinyal yang ditampilkan seseorang yang berakar dari sumber daya materi yang dimiliki dan juga persepsinya terkait peringkatnya dalam hirarki sosial. Adanya sinyal-sinyal itu kemudian membagi orang dalam dua kelas sosial yang berbeda, yakni kelas sosial atas dan kelas sosial bawah. Pikiran, perasaan, dan perilaku orang-orang mempengaruhi ragam kelas sosial yang terbentuk di masyarakat dan sebaliknya, ragam kelas sosial yang ada di masyarakat membentuk pikiran, perasaan, dan perilaku orang-orang di dalamnya.

Ada dua premis dalam memandang kelas sosial menurut perspektif budaya (Stephens & Townsend, 2013). Pertama, konteks kelas sosial adalah konteks budaya dimana orang terus menerus terpapar oleh kondisi material dan sosial tertentu. Misalnya, orang dari kelas sosial atas akan terpapar terus menerus oleh gaya hidup mewah dan interaksi sosial yang individualistik sedangkan orang dari kelas sosial bawah terpapar oleh gaya hidup sederhana dan interaksi yang bersifat komunal. Kedua, konteks kelas sosial berperan penting karena mampu memperkuat kediriannya dan bisa membangun pola pikir, rasa, dan tindakan.

Dengan menggunakan pengukuran tingkat pendidikan partisipan, Snibbe dan Markus (2005) ingin mengetahui bagaimana perbedaan kelas sosial seseorang mempengaruhinya dalam berpikir, merasa, dan berperilaku. Mereka menemukan bahwa perbedaan kelas sosial orang Amerika mempengaruhi pilihan jenis musik yang disukai dan hal ini berkaitan dengan bagaimana model diri dan agensinya. Partisipan yang mengenyam pendidikan tinggi (sarjana) lebih suka musik rock sedangkan partisipan yang mengenyam pendidikan rendah (sekolah menengah atau lebih rendah) lebih suka musik country. Analisis isi terhadap kedua jenis musik ini menunjukkan bahwa lirik musik country mengandung tema integritas, penyesuaian diri, dan peka terhadap pengaruh. Sedangkan lirik musik rock dinilai mengandung ekspresi keunikan, mengendalikan lingkungan, dan mempengaruhi orang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Stephens dan koleganya (Stephens, Markus, & Townsend, 2007) menunjukkan bahwa kelas sosial yang berbeda mempengaruhi cara seseorang dalam menentukan pilihan. Dalam penelitian

mereka (studi 1), partisipan yang berasal dari kelas sosial bawah cenderung memilih pena yang sama dengan pena-pena lain yang tersedia. Sedangkan partisipan dari kelas sosial atas cenderung memilih pena yang relatif berbeda dengan pena lain yang disediakan. Pada studi mereka yang lain (studi 2) kelas sosial yang berbeda menunjukkan perbedaan konformitas dalam menentukan pilihan. Partisipan dari kelas sosial bawah lebih memilih gambar yang sama yang dipilih oleh partisipan sebelumnya dibanding partisipan dari kelas sosial atas.

Dengan berpijak pada pendekatan budaya, beberapa peneliti mengembangkan pendekatan kognitif terhadap kelas sosial. Berdasarkan pendekatan ini, kelas sosial bisa menciptakan suatu pola pikir dan cara pandang yang dibangun melalui interaksi di antara orang-orang yang punya keadaan yang sama (Kraus, et al., 2012). Sumber daya materi yang dimiliki dan persepsi atas peringkat kelas sosial dirinya di masyarakat membangun suatu konteks kelas sosial tertentu. Konteks kelas sosial ini menghasilkan suatu kecenderungan kognitif tertentu dan memandunya dalam berpikir, merasa, dan bertindak.

Berdasarkan pendekatan kognitif, ada dua kecenderungan kognitif dalam kelas sosial (Kraus, et al., 2012). Orang dari kelas sosial bawah cenderung mengembangkan pola kognisi sosial yang kontekstual. Orang dengan kecenderungan ini pikiran, perasaan, dan tindakannya dipengaruhi oleh kekuatan eksternal yang berada di luar kendalinya. Ini karena konteks kelas sosial bawah didominasi oleh keadaan yang serba kekurangan, penuh ketidakpastian, dan tidak bisa diprediksi.

Sementara, orang dari kelas sosial atas cenderung mengembangkan pola kognisi sosial yang solipsistik. Orang dengan kecenderungan ini memandang bahwa keadaan internal dirinyalah yang lebih utama dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan. Ini karena konteks sosial kelas atas didominasi oleh keadaan yang serba berkecukupan dan perasaan berada pada kelas sosial di atas rata-rata sehingga mereka punya kebebasan yang lebih besar dalam menentukan tujuan dan minat sesuai pilihannya.

2.2.3. Karakteristik Kelas Sosial

2.2.3.1. Konsep tentang Diri

Kelas sosial seseorang berpengaruh terhadap kediriannya. Konteks kelas sosial tertentu yang melingkupi kehidupan sehari-hari seseorang mempengaruhi konsep tentang kedirian. Penelitian menunjukkan orang dari kelas sosial bawah memandang diri (*self*) terhubung dengan orang lain dan saling tergantung satu sama lain (bersifat interdependen), sedang orang dari kelas atas memandang bahwa diri itu bersifat independen (Stephens, et al., 2007). Partisipan dari kelas sosial bawah cenderung memilih pilihan yang disukai orang lain sedang partisipan dari kelas sosial atas cenderung memilih pilihan yang berbeda dengan orang lain.

Kelas sosial mempengaruhi orang terkait kemampuan dalam mengendalikan (*sense of control*). Orang dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki *sense of control* yang lebih tinggi dibanding orang dengan pendapatan yang lebih rendah (Lachman & Weaver, 1998; Kraus, et al., 2009). Orang dengan kelas sosial subjektif yang tinggi cenderung memiliki *sense of control* yang lebih tinggi dibanding orang dengan kelas sosial subjektif yang rendah (Kraus, et al., 2009). Ini berarti bahwa dibanding orang dari kelas sosial bawah, orang kelas sosial atas lebih merasa mampu mencapai tujuan yang ditetapkan sekaligus mengatasi hambatan yang dihadapi (Lachman & Weaver, 1998).

Kelas sosial juga mempengaruhi konsep diri pada aspek yang lain, yakni terkait perasaan bahwa dirinya lebih berhak dibanding orang lain (*entitlement*). Partisipan (mahasiswa dan orang dewasa) dengan kelas sosial yang tinggi (baik diukur secara objektif maupun subjektif) menunjukkan tingkat *entitlement* yang lebih tinggi dibanding partisipan dengan kelas sosial yang rendah (studi 1a dan 1b; Piff, 2014). Partisipan dengan kelas sosial tinggi juga menunjukkan tingkat narsistik yang lebih tinggi dibanding partisipan dengan kelas sosial rendah (studi 2) dan cenderung bersikap narsistik dengan melihat dirinya pada cermin saat peneliti meminta partisipan untuk diambil fotonya (studi 3; Piff, 2014).

2.2.3.2. Pola Relasi dengan Orang Lain

Kelas sosial juga berpengaruh terhadap pola relasi seseorang dengan orang lain. Orang dari kelas sosial atas lebih berfokus pada diri sendiri sedangkan orang dari kelas sosial bawah lebih berfokus pada orang lain. Penelitian yang dilakukan Kraus dan Keltner (2009) menunjukkan bahwa partisipan dari kelas sosial atas lebih menampilkan perilaku nonverbal yang menggambarkan kurangnya keterlibatan dengan orang lain. Dalam penelitian mereka, peneliti meminta partisipan berpasangan dan melakukan pembicaraan singkat. Dibandingkan dengan partisipan dari kelas sosial bawah, partisipan dari kelas sosial atas lebih banyak menampilkan perilaku nonverbal yang menunjukkan ketidakterlibatan saat berinteraksi, di antaranya memantaskan baju, mengecek telepon seluler, dan menggambar corat-coret pada kuesioner saat percakapan berlangsung. Sementara itu, dibanding partisipan dari kelas sosial atas, partisipan dari kelas sosial bawah lebih banyak menampilkan perilaku nonverbal yang menunjukkan keterlibatan saat berinteraksi, di antaranya menatap lawan bicara, tertawa, menganggukkan kepala, dan mengangkat kelopak matanya.

Konsep diri yang independen pada orang dari kelas sosial atas dan interdependen pada orang dari kelas sosial bawah berpengaruh dalam pola interaksi yang dibangun dengan orang lain. Orang dari kelas sosial atas cenderung menampilkan perilaku yang mementingkan diri sendiri (*self-interest*) sedangkan orang dari kelas sosial bawah menunjukkan perilaku prososial (Piff, et al., 2010). Pada salah satu studinya (studi 1), Piff dan kolega memberi partisipan 10 poin dan meminta partisipan memutuskan berapa poin yang tetap dimiliki dirinya dan berapa poin yang akan diberikan kepada orang lain yang tidak dikenal sebelumnya (seorang peneliti yang berperan sebagai partner). Partisipan yang kelas sosial subjektifnya rendah (diukur menggunakan *MacArthur Scale*) cenderung lebih banyak jumlah poin yang diberikan kepada partnernya dibandingkan dengan partisipan yang kelas sosial subjektifnya tinggi. Pada studi berikutnya (studi 2) perilaku prososial orang dari kelas sosial bawah ditunjukkan dalam perilaku menyumbang. Orang dari kelas sosial bawah (baik diukur secara objektif maupun subjektif) cenderung lebih banyak prosentase uang yang disumbangkan dibanding partisipan dari kelas sosial atas. Ini menunjukkan orang kelas sosial bawah

bertindak lebih prososial sedangkan orang kelas sosial atas lebih mementingkan diri sendiri.

Kelas sosial tertentu mempengaruhi cara orang dalam menanggapi keadaan yang menimpa dirinya. Orang dari kelas sosial bawah cenderung menggunakan penjelasan yang bersifat kontekstual terkait kesenjangan ekonomi, pencapaian berbagai aspek kehidupan, dan emosi yang dialami orang lain dibandingkan dengan orang dari kelas sosial atas (Kraus, et al., 2009). Dengan demikian, orang dari kelas sosial bawah cenderung menjelaskan pencapaian hidup yang diperoleh (misalnya pendapatan yang rendah) disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar dirinya. Bagi orang dengan kelas sosial atas, mereka cenderung menggunakan penjelasan yang bersifat disposisional, yakni bahwa apa yang dialami saat ini disebabkan oleh faktor-faktor yang ada dalam dirinya.

Perbedaan kelas sosial membuat kemampuan orang dalam berempati juga berbeda. Karena orang dari kelas sosial bawah lebih menggunakan penjelasan yang bersifat eksternal, ini berpengaruh terhadap kemampuannya dalam berempati. Orang dari kelas sosial bawah memiliki kemampuan empati yang lebih tinggi dibandingkan orang dari kelas sosial atas (Kraus, et al., 2010). Dibanding partisipan dari kelas atas, partisipan dari kelas sosial bawah lebih tinggi nilainya dalam tes yang mengukur ketepatan dalam berempati (studi 1). Pada studi berikutnya (studi 2) partisipan dari kelas sosial bawah juga lebih akurat dalam menilai emosi partisipan lain yang sama-sama sedang berada dalam wawancara kerja (hipotetikal).

Sejalan dengan kemampuannya berempati, orang dari kelas sosial bawah lebih tinggi dalam welas asih (*compassion*), yakni emosi yang menunjukkan kepedulian pada orang lain dan berkeinginan untuk membantu mengatasi penderitaan orang lain, dibanding dengan orang kelas atas. Penelitian yang dilakukan oleh Stellar dan koleganya (2011) menunjukkan, dibanding partisipan dari kelas sosial atas, partisipan dari kelas sosial bawah menampilkan tingkat welas asih yang tinggi baik saat diuji melalui *self-report* (studi 1), setelah menonton video yang menggambarkan penderitaan orang (studi 2) maupun selama berlangsungnya interaksi yang penuh tekanan (*stressful*) dengan orang lain (studi 3).

Akibat perbedaan dalam konsep diri terkait *entitlement*, orang dari kelas sosial atas berbeda dengan orang dari kelas sosial bawah dalam menampilkan perilaku etis saat berinteraksi dengan orang lain. Baik menggunakan metode eksperimen laboratorium maupun alamiah, orang dari kelas sosial atas cenderung berperilaku tidak etis dibandingkan orang dari kelas sosial bawah (Piff, et al., 2012). Dibanding kelas bawah, orang dari kelas atas lebih sering menggunakan mobilnya dengan cara yang tidak etis, bahkan cenderung melanggar hukum. Melalui sebuah eksperimen alamiah (studi 1 dan 2), Piff dan koleganya mendapati bahwa pengendara mobil mewah lebih banyak memotong jalan pengendara lain dibanding pengendara mobil biasa. Mereka juga mengabaikan pengguna jalan kaki yang berdiri di tepi jalan hendak menyeberang di garis penyeberangan, sementara mereka terus melajukan kendaraannya. Studi laboratorium mengkonfirmasi temuan yang sama. Saat partisipan usai mengikuti penelitian, mereka yang dari kelas sosial atas lebih cenderung mengambil permen yang disediakan untuk anak-anak yang sedang terlibat penelitian pada ruangan yang lain. Mengambil permen yang disediakan bukan untuk dirinya merupakan perilaku tidak etis karena mengurangi jumlah permen yang harusnya diberikan untuk anak-anak (studi 3; Piff, et al., 2012).

2.3. Kelas Sosial dan Penilaian atas Keadilan

Orang dengan kelas sosial yang berbeda menunjukkan pola kognitif yang berbeda pula dan ini membuat adanya perbedaan dalam menilai keadilan. Kelas sosial seseorang berkaitan dengan keyakinan bahwa dunia ini adil (*belief in a just world*) dan keyakinan bahwa seseorang bisa mendapatkan apa yang diusahakannya (*meritocracy belief*, Kraus & Keltner, 2013). Partisipan dengan kelas sosial atas (diukur berdasarkan tingkat pendapatannya) lebih besar keyakinannya bahwa masyarakat itu adil dibanding partisipan dengan kelas sosial bawah. Dengan demikian, besarnya sumber daya materi yang dimiliki seseorang membuatnya punya keyakinan lebih besar bahwa masyarakat itu adil.

Penelitian yang menghubungkan kelas sosial dan keadilan dilakukan oleh Kraus dan Keltner (2013) dengan memandang keadilan dari kecenderungan orang dalam memilih cara memberikan hukuman, yakni apakah lebih memilih keadilan

retributif dengan memberi hukuman yang setimpal untuk memberi efek jera, atau memilih keadilan restoratif dengan berfokus pada rehabilitasi baik pada korban maupun pelanggar hukum. Kelas sosial yang berbeda membuat berbeda pula penilaiannya atas hukuman. Studi 4 pada penelitian yang dilakukan oleh Kraus dan Keltner (2013) menunjukkan bahwa terhadap skenario tentang tindakan kejahatan finansial, partisipan yang dimanipulasi dalam kelas sosial atas maupun kelas sosial bawah lebih memilih bentuk hukuman restoratif daripada retributif, misalnya dengan membuat perjanjian di antara kedua belah pihak (korban dan pelanggar hukum) tentang apa harus yang dilakukan oleh pelanggar hukum untuk memperbaiki keadaan akibat perbuatannya. Namun, partisipan yang dimanipulasi kelas bawah cenderung lebih besar dalam memberikan hukuman restoratif dibandingkan dengan partisipan yang dimanipulasi kelas atas. Ini karena orang dari kelas atas dan kelas bawah berbeda terkait keyakinannya tentang perbedaan kelas sosial di masyarakat (studi 1, Kraus & Keltner, 2013). Orang dari kelas sosial atas cenderung memiliki keyakinan esensialis, yakni bahwa perbedaan kelas sosial bersifat biologis dan genetik sehingga tidak dapat diubah, sedangkan orang dari kelas bawah cenderung berpandangan konstruktivis, yakni bahwa perbedaan kelas sosial adalah hasil konstruksi sosial masyarakat sehingga dapat diubah. Perbedaan pandangan ini membuat orang dari kelas bawah lebih besar kecenderungannya dalam menggunakan hukuman restoratif dibandingkan orang dari kelas atas.

Penelitian Kraus dan Keltner (2013) tersebut menunjukkan bahwa kelas sosial seseorang mempengaruhi penilaiannya atas keadilan. Namun demikian, penelitian itu hanya terbatas pada keadilan dalam perspektif cara memberi hukuman. Menurut peneliti, perlu kiranya dilakukan penelitian yang menghubungkan kelas sosial dan keadilan dengan memandang keadilan dalam perspektif yang lain, dalam hal ini keadilan prosedural. Mengingat keadilan prosedural menjadi kajian penting dalam teori keadilan, peneliti berpandangan perlu dilakukan penelitian yang mengkaji bagaimana pengaruh kelas sosial terhadap keadilan prosedural.

2.4. Hubungan antara Kelas Sosial dan Penilaian Keadilan Prosedural

Psikologi memandang keadilan sebagai masalah subjektif (Tyler, et al., 1997) sehingga setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda tentang keadilan. Penilaian adil atau tidaknya atas apa yang dialami, termasuk prosedur yang diberlakukan oleh suatu otoritas terhadap dirinya, akan dipengaruhi oleh apa yang ia pikirkan, rasakan, dan lakukan saat berinteraksi dengan orang lain selama ini (Tyler, et al., 1997). Penilaian keadilan prosedural berkaitan dengan banyak aspek psikologis yang lain (Sidikides, et al., 2008). Sementara, kelas sosial seseorang mempengaruhi caranya dalam berpikir, merasa, dan berperilaku yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari (Kraus, et al., 2011).

Semakin seseorang mengembangkan pola kognisi dan moral yang lebih bersifat individual, semakin ia menunjukkan penilaian keadilan prosedural (MacCoun, 2005). Penilaian keadilan prosedural berkaitan dengan keyakinannya terhadap apa yang akan terjadi, apa yang bisa terjadi, dan apa yang seharusnya terjadi. Berbagai penelitian tentang penilaian keadilan menunjukkan bahwa selain bersifat self-interest, penilaian keadilan prosedural berorientasi pada diri sendiri (*self-oriented*, Lind, et al, 1998). Di samping bersifat relasional (non-instrumental), proses pengambilan keputusan bersifat instrumental. Adanya sifat instrumental ini membuat orang mempertimbangkan bahwa seperti apa prosedur yang diberlakukan dalam suatu proses pengambilan keputusan akan berpengaruh terhadap hasil keputusan (*outcome*) nantinya dan pada akhirnya mempengaruhinya dalam menilai apakah suatu prosedur itu adil atau tidak adil.

Moral yang lebih bersifat individual juga mempengaruhi orang dalam melakukan penilaian keadilan prosedural. Sejalan dengan argumen moral Kohlberg, pandangan tentang keadilan prosedural muncul dalam suatu urutan perkembangan yang didahului oleh kepentingan pribadi (*self-interest*) murni dan kemudian perhatiannya terhadap keadilan distributif (Wendorf, Alexanter, & Firestone, 2002). Ketika membuat penilaian moral, orang dari kelas atas cenderung memaksimalkan keuntungan dengan cara mengekspresikan keinginannya dengan bertindak yang sedikit menyakiti tapi banyak keuntungannya (utilitarian, Cote, Piff, & Willer, 2013).

Dari gambaran di atas dapat diketahui bahwa ada perbedaan pola kognisi, sikap, dan perilaku antara orang dari kelas sosial atas dan orang dari kelas sosial bawah. Orang kelas atas lebih *self-interest*, *self-oriented*, dan utilitarian dibanding orang kelas bawah. Ini membuat peneliti menduga bahwa kelas sosial seseorang berpengaruh dalam melakukan penilaian keadilan prosedural. Dalam hal ini, peneliti menduga orang dari kelas sosial atas lebih menunjukkan kepekaan dalam penilaian keadilan proseduralnya dibanding orang dari kelas sosial bawah.

Orang dari kelas sosial tertentu membentuk pola budaya (Markus & Kitayama, 2003; Markus & Kitayama, 2010) dan pola kognisi sosial yang tertentu pula (Kraus, et al., 2012). Pola budaya dan kognisi yang berbeda membuat orang dengan kelas sosial tertentu memiliki karakteristik yang khas baik pada konsep diri maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Peneliti menduga ada perbedaan antara kelas sosial atas dan kelas sosial bawah dalam memandang keadilan prosedural yang menimpa dirinya maupun yang menimpa orang lain.

Penilaian keadilan dipengaruhi oleh dua motif, yakni motif individualistik dan motif sosial (Van Prooijen, 2013). Keadilan prosedural pada hakekatnya bersifat egosentris di mana orang dengan orientasi *proself* akan lebih peka dalam menilai adil atau tidaknya prosedur yang diterapkan dibanding orang dengan orientasi prososial (Van Prooijen, et al., 2008). Karakteristik orang kelas atas yang independen (Stephens, et al., 2007), punya *sense of control* (Lachman & Weaver, 1998; Kraus, et al., 2009) dan *entitlement* yang tinggi (Piff, 2014), dan dengan menampilkan pola relasi yang berorientasi diri sendiri seperti perilaku non-verbal yang berfokus pada diri sendiri (Kraus & Keltner, 2009), lebih mementingkan diri sendiri (*self-interest*, Piff, et al., 2010), menggunakan penjelasan disposisional terhadap keadaan yang menimpanya (Kraus, et al., 2009), empati (Kraus, et al., 2010) dan welas asih (Stellar, et al., 2011) yang lebih rendah, membuat peneliti menduga kalau orang dari kelas sosial atas akan cenderung memiliki motif individualistik dalam menilai keadilan prosedural. Ini membuat orang dari kelas sosial atas cenderung lebih peka dalam menilai adil atau tidaknya prosedur yang menimpa dirinya dibanding orang dari kelas sosial bawah.

Sementara, orang dari kelas sosial bawah menunjukkan konsep diri yang sebaliknya, yakni lebih dependen, *sense of control* dan *entitlement* yang rendah,

dan menampilkan perilaku yang berorientasi orang lain seperti berfokus pada orang lain, lebih prososial, menggunakan penjelasan kontekstual, empati dan welas asih yang tinggi, sehingga orang dari kelas bawah lebih mungkin menampilkan motif sosial dalam menilai keadilan prosedural. Ini membuat orang dari kelas sosial bawah cenderung lebih peka dalam menilai adil atau tidaknya prosedur yang menimpa orang lain dibanding orang dari kelas sosial atas.

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan teori tentang keadilan prosedural dan kelas sosial serta kemungkinan hubungan di antara keduanya sebagaimana diungkap di atas, peneliti membuat hipotesis penelitian sebagai berikut.

Hipotesis 1: Ada pengaruh kelas sosial partisipan terhadap penilaian keadilan prosedural saat partisipan mengalami prosedur pengambilan keputusan.

Hipotesis 2: Dibanding partisipan yang berada pada kondisi kelas sosial bawah, partisipan yang berada dalam kondisi kelas sosial atas menunjukkan kepekaan penilaian keadilan prosedural yang lebih besar berkenaan dengan prosedur pengambilan keputusan yang dilakukan, baik adil maupun tidak adil.

Hipotesis 3: Dibanding partisipan pada kondisi kelas sosial atas, partisipan dalam kondisi kelas sosial bawah menunjukkan tingkat penilaian keadilan prosedural yang lebih rendah saat orang lain mengalami prosedur pengambilan keputusan yang tidak adil.

2.6. Penelitian Ini

Untuk menguji ketiga hipotesis tersebut, saya melakukan dua studi. Pada kedua studi tersebut, saya menduga ada pengaruh kelas sosial partisipan terhadap penilaian keadilan prosedural saat mereka dihadapkan pada prosedur pengambilan keputusan. Pada studi 1, saya menguji hipotesis bahwa dibandingkan dengan partisipan yang berada dalam kondisi kelas bawah, partisipan yang berada dalam kondisi kelas sosial atas menunjukkan kepekaan penilaian keadilan prosedural

yang lebih besar saat dirinya menghadapi prosedur pengambilan keputusan, baik adil maupun tidak adil. Pada studi 2, saya menguji hipotesis bahwa dibandingkan dengan partisipan dalam kondisi kelas atas, partisipan dalam kondisi kelas bawah lebih menunjukkan tingkat penilaian keadilan prosedural yang lebih rendah saat orang lain mengalami ketidakadilan dalam prosedur pengambilan keputusan.

BAB 3

STUDI 1

Pada studi 1, saya menguji hipotesis bahwa ada pengaruh kelas sosial partisipan terhadap penilaian keadilan prosedural saat mereka mengalami prosedur pengambilan keputusan, baik adil maupun tidak adil (H1). Studi 1 sekaligus mengetahui kelas sosial mana yang lebih peka terhadap penilaian keadilan prosedural, apakah kelas sosial atas atau kelas sosial bawah (H2).

3.1. Metode

3.1.1. Partisipan dan Desain

Partisipan dalam studi 1 adalah 139 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (21 laki-laki dan 118 perempuan). Usia partisipan antara 17 sampai 23 tahun ($M_{age} = 18,3$ tahun). Pendidikan orangtua partisipan bervariasi mulai dari tidak sekolah/tidak tamat SD sampai S2 dengan rata-rata pendidikan SMA/ sederajat. Sementara pendapatan orangtua partisipan mulai dari di bawah 1 juta/bulan sampai 10-15 juta/bulan dengan rata-rata pendapatan orangtua 2 juta sampai 3,5 juta rupiah/bulan.

Studi 1 menggunakan rancangan eksperimental dengan desain faktorial yang mengacak partisipan dalam kondisi 2 (kelas sosial relatif: kelas sosial atas vs kelas sosial bawah) x 2 (prosedur pengambilan keputusan: tidak ada aspirasi atau *no-voice* vs ada aspirasi atau *voice*). Desain menggunakan *between-subjects design*. Gambaran partisipan dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1.

Gambaran Partisipan dan Kondisi Berdasarkan Variabel Penelitian

	Rata-rata	SD
Usia (tahun)	18.3	1.02
	<i>N</i>	% dari total
Jenis Kelamin		
Laki-laki	21	15.1
Perempuan	118	84.9
Kondisi		
Kelas sosial atas – <i>Voice</i>	32	23
Kelas sosial atas – <i>No-voice</i>	32	23
Kelas sosial bawah – <i>Voice</i>	38	27.4
Kelas sosial bawah – <i>No-voice</i>	37	26.6
	Rata-rata	SD
SES		
Pendapatan orangtua	3.3	1.45
Pendidikan orangtua	4.12	1.04

Note. Pendapatan orangtua/bulan: 1 = kurang dari 1 juta, 2 = 1 - 2 juta, 3 = 2 - 3,5 juta, 4 = 3,5 - 5 juta, 5 = 5 - 7,5 juta, 6 = 7,5 - 10 juta, 7 = 10 - 15 juta, 8 = lebih dari 15 juta. Pendidikan orangtua: 1 = tidak sekolah/tidak tamat SD, 2 = SD, 3 = SMP, 4 = SMA/SMK, 5 = Diploma I-II-III, 6 = S-1, 7 = S-2, 8 = S-3.

3.1.2. Variabel dan Pengukuran**3.1.2.1 *Dependent Variable (DV)* : Penilaian Keadilan Prosedural**

Pengertian penilaian keadilan prosedural dalam penelitian ini adalah proses kognitif dalam menentukan apakah suatu prosedur pengambilan keputusan dipandang adil (Lind & Tyler, 1988). Penilaian keadilan prosedural diukur dengan menanyakan kepada partisipan tentang seberapa adil prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, peneliti mengikuti item yang digunakan Van den Bos dan Van Prooijen (2001) dalam mengukur penilaian keadilan prosedural, yakni dengan menanyakan kepada partisipan seberapa adil (1 berarti sangat tidak adil, 7 berarti sangat adil), pantas (1 sangat tidak pantas, 7 sangat pantas) dan tepat (1 sangat tidak tepat, 7 sangat tepat) prosedur yang diberlakukan kepada partisipan dan temannya dalam mendapatkan bonus. Uji reliabilitas pengukuran penilaian keadilan prosedural menunjukkan Alpha Cronbach = .91, tergolong sangat reliabel.

3.1.2.2. *Independent Variable (IV) 1: Kelas Sosial Subjektif*

Pengertian kelas sosial subjektif dalam penelitian ini adalah persepsi seseorang tentang posisinya dalam hirarki sosial yang menempatkan kelas sosialnya pada peringkat tertentu (Adler, et al., 2000; Goodman, et al., 2001). Kelas sosial subjektif berbeda dengan kelas sosial objektif yang menempatkan seseorang berdasarkan tingkat kekayaan, tingkat pendidikan, dan status pekerjaannya (Adler, et al., 2000; Oakes & Rossi, 2003). Bersama kelas sosial objektif, kelas sosial subjektif mempengaruhi proses kognisi seseorang dan memandu dalam berpikir, merasa, dan bertindak (Kraus, et al., 2011; Kraus, et al., 2012).

Dalam eksperimen ini, saya memanipulasi kelas sosial subjektif partisipan sebagaimana digunakan dalam penelitian Piff dan koleganya (Piff, et al., 2010). Manipulasi tersebut diadaptasi dari pengukuran persepsi subjektif seseorang terhadap peringkat kelas sosialnya dan manipulasi deprivasi relatif. Berbagai penelitian manipulasi kelas sosial subjektif menunjukkan bahwa partisipan yang dimanipulasi dalam kelas atas dan kelas bawah berhasil menampilkan pola kognisi sosial yang konsisten dengan orang yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan kelas sosial tersebut (Kraus, et al., 2013).

Manipulasi dilakukan dengan mengacak partisipan dalam dua kondisi, yakni kondisi kelas sosial atas dan kondisi kelas sosial bawah. Pada setiap kondisi, partisipan disajikan gambar tangga dengan 10 anak tangga. Saya meminta kepada partisipan untuk “Memikirkan bahwa tangga tersebut mewakili keberadaan orang Indonesia”. Partisipan yang berada dalam kondisi kelas atas diminta membandingkan dirinya dengan orang dari tangga paling bawah, sedang partisipan yang berada dalam kondisi kelas bawah diminta membandingkan dirinya dengan orang dari tangga paling atas. Instruksinya sebagai berikut (Piff, et al., 2010).

Sekarang, bandingkan diri Anda dengan orang yang berada pada tangga paling bawah (atas). Ia adalah orang yang keadaannya paling buruk (baik), yakni orang yang punya paling sedikit (banyak) uang, paling rendah (tinggi) pendidikannya, dan paling rendah (tinggi) status pekerjaannya. Kami meminta Anda untuk berpikir bahwa Anda berbeda dengan orang tersebut dalam hal keuangan, riwayat pendidikan, dan status

pekerjaan. Di mana Anda akan menempatkan diri Anda dalam tangga di atas jika dibandingkan dengan orang yang berada pada tangga paling bawah (atas) tersebut?

Lalu partisipan menempatkan diri mereka pada tangga tersebut sedemikian rupa relatif dengan orang kelas atas atau bawah (10 = anak tangga paling atas, 1 = anak tangga paling bawah).

Untuk menguatkan manipulasi, setelah partisipan menempatkan diri mereka pada tangga, mereka diminta membayangkan berkenalan dengan seseorang dari orang yang Anda pikirkan berada pada tangga tersebut. Lebih spesifik lagi, partisipan diminta untuk “memikirkan bagaimana perbedaan di antara Anda berdampak pada apa yang akan Anda obrolkan, akan seperti apa interaksi itu berlangsung, dan apa yang Anda dan orang tersebut akan katakan satu sama lain.” Partisipan menuliskannya minimal enam kalimat.

Untuk menguji keberhasilan manipulasi kelas sosial subjektif, peneliti melakukan beberapa studi pilot. Studi pilot pertama melibatkan 20 mahasiswa dengan manipulasi kelas sosial subjektif melalui kuesioner yang dibagikan oleh kepada partisipan yang ditemui peneliti di kampus Universitas Indonesia. Uji manipulasi menggunakan *independent sample t-test* menunjukkan bahwa partisipan yang dimanipulasi kelas sosial atas justru menunjukkan rata-rata kelas sosial yang lebih rendah ($M = 5.5$, $SD = 1.35$) dibanding partisipan yang dimanipulasi kelas sosial bawah ($M = 6.1$, $SD = 1.52$), $t(18) = -.93$. Peneliti mula-mula menduga kurangnya penjelasan tentang kelas sosial dalam kuesioner yang menyebabkan hasil manipulasi tidak signifikan. Namun, studi pilot kedua dan ketiga (masing-masing melibatkan 16 mahasiswa) yang dilakukan dengan menambah penjelasan tentang kelas sosial dalam kuesioner juga menunjukkan nilai rata-rata kelas sosial yang tidak signifikan, masing-masing secara berturut-turut $t(14) = 1.18$ dan $t(14) = 1.27$.

Peneliti menduga, tidak signifikannya hasil studi pilot padahal sudah diberikan penjelasan tentang kelas sosial yang lebih detail dalam kuesioner membuat peneliti berpendapat bahwa partisipan perlu dipandu dalam mengerjakan instrumen yang digunakan dalam manipulasi. Studi pilot keempat dilakukan di dalam kelas dengan merandom partisipan dalam dua kelompok, yakni kelompok

atas dan kelompok bawah. Pada masing-masing kelompok, peneliti membacakan instruksi manipulasi kelas sosial subjektif seperti tercantum dalam kuesioner. Ada 43 partisipan yang terlibat dalam pilot. Mereka adalah mahasiswa semester 1 program studi Pendidikan Ekonomi jurusan Ekonomi dan Administrasi Pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Kelompok yang berada dalam manipulasi kelas atas berjumlah 22 mahasiswa sedangkan kelompok yang berada dalam manipulasi kelas bawah berjumlah 21 mahasiswa. Uji manipulasi menggunakan *independent sample t-test* menunjukkan ada perbedaan kelas sosial yang signifikan di antara dua kelompok. Partisipan yang dimanipulasi kelas sosial atas lebih tinggi rata-rata kelas sosialnya ($M = 6.73$, $SD = 2.31$) dibanding partisipan yang dimanipulasi kelas sosial bawah ($M = 5.67$, $SD = 1.28$), $t(41) = 1.848$, $p = 0.036$, $d = .58$.

3.1.2.3. Independent Variable (IV) 2: Prosedur Pengambilan Keputusan

Prosedur pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah prosedur yang diterapkan dalam proses pengambilan keputusan yang mengikuti standar normatif tentang keadilan (Lind & Tyler, 1988). Menurut Lind dan Tyler (1988), dengan mendesain prosedur yang objektif dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan penilaian orang tentang keadilan prosedural.

Fenomena khas dalam keadilan prosedural adalah bahwa orang banyak dipengaruhi oleh penilaiannya tentang sejauh mana suatu prosedur pengambilan keputusan diterapkan kepadanya, apakah adil atau tidak adil (Van Prooijen, et al., 2008). Prosedur pengambilan keputusan yang dipandang adil akan berpengaruh positif baik dalam persepsi, emosi, dan tingkah laku dibandingkan dengan prosedur pengambilan keputusan yang dipandang tidak adil.

Pada studi 1, elemen keadilan prosedural yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah aspirasi (*voice*). Pengambilan keputusan dilakukan dengan memberikan aspirasi atau pendapat kepada partisipan terhadap keputusan yang akan diambil.

Prosedur pengambilan keputusan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skenario. Partisipan membaca dan menjawab informasi yang telah dimanipulasi. Pada studi 1, partisipan dibagi dalam dua manipulasi prosedur

pengambilan keputusan, yakni kondisi tidak ada aspirasi (*no-voice*) vs kondisi ada aspirasi (*voice*). Skenario pada studi 1 diadaptasi dari skenario yang dibuat oleh Van den Bos (1999) seperti berikut ini.

Pada liburan semester lalu, Anda dan teman Anda bekerja pada sebuah perusahaan event organizer (EO). Anda dan teman Anda berada pada suatu tim untuk sebuah event yang diadakan perusahaan tersebut. Pada tim tersebut, Anda dan teman Anda bekerja sebagai satu partner kerja. Ada 10 partner kerja dalam tim. Anda dan teman Anda sama-sama bekerja keras dan menampilkan kinerja yang baik. Karena semua anggota tim telah menunjukkan kinerja yang baik, diumumkan pada hari terakhir kerja bahwa sebuah bonus sebesar 20 juta rupiah akan dibagikan kepada semua anggota tim. Sejumlah uang telah dialokasikan untuk Anda dan teman Anda. Koordinator tim harus memutuskan bagaimana sejumlah uang tersebut akan dibagikan antara Anda dan teman Anda.

Lalu skenario ini dilanjutkan dengan manipulasi prosedur pengambilan keputusan. Partisipan pada kondisi ada aspirasi dan kondisi tidak ada aspirasi membaca kalimat berikut ini (kata yang dicetak miring masing-masing untuk kedua kondisi).

Koordinator tim akhirnya memutuskan untuk *meminta pendapat Anda: Anda boleh memberikan pendapat/tidak meminta pendapat Anda: Anda tidak boleh memberikan pendapat* tentang bagaimana uang tersebut seharusnya dibagikan antara Anda dan teman Anda.

Untuk mengecek keberhasilan manipulasi pengambilan keputusan prosedural berdasarkan aspirasi, partisipan ditanya dengan dua pertanyaan berikut (1=tidak sama sekali, 7=sangat banyak): “Sejauh mana koordinator tim memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang pembagian uang bonus antara Anda dan teman Anda?”, dan “Seberapa banyak perhatian yang diberikan koordinator tim atas pendapat Anda tentang pembagian uang bonus antara Anda dan teman Anda?”

3.1.3. Prosedur Penelitian

Mula-mula, partisipan yang akan terlibat dalam penelitian diminta kesediaannya untuk mengikuti penelitian dengan cara mengisi *informed consent*. Partisipan diberitahu bahwa mereka akan terlibat dalam penelitian tentang persepsi sosial.

Kepada partisipan dilakukan *random assignment* sehingga memungkinkan setiap partisipan berada dalam satu dari empat kelompok kondisi, yakni (1) kelas atas dan ada aspirasi, (2) kelas atas dan tidak ada aspirasi, (3) kelas bawah dan ada aspirasi, dan (4) kelas bawah dan tidak ada aspirasi.

Pertama-tama partisipan disajikan gambar tangga dengan 10 anak tangga yang menunjukkan keberadaan (kelas sosial) orang Indonesia. Lalu partisipan diminta untuk membandingkan diri mereka dengan orang yang berada pada kelas sosial tertentu yang berbeda dengan dirinya (pada kondisi kelas atas partisipan diminta membandingkan dirinya dengan orang dari kelas bawah, demikian sebaliknya). Lalu, partisipan diminta menempatkan dirinya pada anak tangga tertentu dari 10 anak tangga untuk menunjukkan perbedaan kelas sosial partisipan dengan orang yang dibandingkan.

Lalu partisipan diminta membayangkan berkenalan dengan orang yang ia bandingkan tersebut. Mereka diminta menuliskan tidak lebih dari 6 kalimat tentang apa yang akan diobrolkan dalam perkenalan itu.

Selanjutnya partisipan diminta membaca skenario tentang prosedur pengambilan keputusan. Kemudian partisipan menjawab pertanyaan tentang penilaian keadilan procedural dan pertanyaan tentang sejauh mana prosedur aspirasi diterapkan dalam pengambilan keputusan sebagai *manipulation check*. Kemudian partisipan mengisi data demografis berupa jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, suku, dan tingkat pendapatan orangtua.

Terakhir, dilakukan *debriefing* terhadap partisipan dan peneliti mengucapkan terima kasih kepada partisipan atas kesediaannya terlibat dalam penelitian.

3.2. Hasil

3.2.1. Manipulation Check

Peneliti melakukan *manipulation check* untuk mengetahui apakah manipulasi kelas sosial yang dilakukan partisipan berhasil. Peneliti membandingkan rata-rata kelas sosial subjektif antara partisipan yang dimanipulasi kelas sosial atas dan partisipan yang dimanipulasi kelas sosial bawah menggunakan *independent sample t-test*. Partisipan yang berada pada kelas sosial atas, yakni yang membandingkan dirinya dengan orang yang berada pada tangga paling bawah, menempatkan diri mereka lebih tinggi ($M = 5.84$, $SD = 1.84$) dibanding partisipan yang berada pada kelas sosial bawah ($M = 5.12$, $SD = 1.32$), yakni yang membandingkan dirinya dengan orang yang berada pada kelas sosial atas, $t(137) = 2.69$, $p < .01$, $d = .46$. Hasil ini menegaskan bahwa manipulasi yang dilakukan berhasil mengubah pandangan partisipan terhadap kelas sosial relatifnya. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2.

Hasil Independent Sampe t-test Kelas Sosial Subjektif Berdasarkan Manipulasi Kelas Sosial

Hasil	Manipulasi Kelas Sosial						95% CI for		
	Atas			Bawah			Mean Difference	T	df
	M	SD	N	M	SD	n			
Kelas sosial subjektif	5.84	1.84	64	5.12	1.32	75	0.19, 1.26	2.69**	137

* $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

Untuk mengetahui keberhasilan manipulasi prosedur pengambilan keputusan, peneliti melakukan analisis 2 (kelas sosial relatif) x 2 (prosedur) ANOVA terhadap skala pengecekan prosedur. Hasilnya menunjukkan bahwa *main effect* hanya pada prosedur, $F(1, 137) = 187.374$, $p < .01$. Partisipan yang berada pada kondisi boleh memberikan pendapat (*voice*) memandang bahwa dirinya lebih banyak mendapat kesempatan memberikan pendapat ($M = 5.04$, $SD = 1.38$) dibanding partisipan yang berada pada kondisi tidak boleh memberikan pendapat (*no-voice*, $M = 1.97$, $SD = 1.23$). Hasil ini menunjukkan bahwa

manipulasi prosedur berhasil. Hasil ANOVA skala pengecekan prosedur dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3.

Hasil Two-Way ANOVA Memprediksi Skala Pengecekan Prosedur berdasarkan Kelas Sosial dan Prosedur

Sumber	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kelas sosial relatif	.368	1	.368	.212	.646
Prosedur	325.332	1	325.332	187.374	.000
Kelas sosial × Prosedur	.051	1	.051	.029	.865
Total	2283.000	139			

3.2.2. Kepekaan Penilaian Keadilan Prosedural yang Dialami Diri Sendiri

Untuk menguji hipotesis pertama (H1) dan kedua (H2), peneliti melakukan uji *independent sample t-test* dan regresi linier berganda. Hasil uji *independent sample t-test* secara keseluruhan pada dua kondisi prosedur menunjukkan bahwa partisipan yang berada pada kondisi kelas atas menunjukkan penilaian keadilan prosedural yang lebih rendah ($M = 3.82$, $SD = 1.85$) dibanding partisipan yang berada pada kondisi kelas bawah ($M = 4.21$, $SD = 1.79$), $t(137) = -1.27$, $p = .208$, n.s. Pada kondisi *voice*, partisipan yang berada pada kondisi kelas atas menunjukkan penilaian keadilan prosedural yang lebih rendah ($M = 4.75$, $SD = 1.70$) dibanding partisipan yang berada pada kondisi kelas bawah ($M = 5.04$, $SD = 1.56$), $t(68) = -.73$, $p = .47$, ns. Pada kondisi *no-voice* juga menunjukkan penilaian keadilan prosedural partisipan dalam kondisi kelas atas lebih rendah ($M = 2.89$, $SD = 1.49$) dibanding partisipan yang berada pada kondisi kelas bawah ($M = 3.36$, $SD = 1.62$), $t(67) = -1.26$, $p = .21$, ns. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa walau ada perbedaan penilaian keadilan prosedural antara partisipan dalam kondisi kelas atas dan partisipan dalam kondisi kelas bawah, perbedaannya tidak signifikan. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penilaian keadilan prosedural antara partisipan dalam kondisi kelas atas dan partisipan dalam kondisi kelas bawah. Hasil *independent sample t-test* penilaian keadilan prosedural pada kondisi *voice*, *no-voice*, dan keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4.

Hasil Independent Sample t-test Penilaian Keadilan Prosedural pada Kondisi Voice, No-Voice, dan Keseluruhan

Hasil	Manipulasi Kelas Sosial						95% CI for		
	Atas			Bawah			Mean		
	M	SD	N	M	SD	n	Difference	t	df
<i>Voice</i>	4.75	1.70	32	5.04	1.56	38	-1.06, 0.49	-0.73	68
<i>No-Voice</i>	2.89	1.49	32	3.36	1.62	37	-1.23, 0.28	-1.26	67
Keseluruhan	3.82	1.85	64	4.21	1.79	75	-1.00, 1.22	-1.67	137

Peneliti melakukan analisis regresi linier berganda dengan meregresikan penilaian keadilan prosedural terhadap kelas sosial relatif, prosedural, dan interaksi di antara keduanya, dengan mengendalikan variabel jenis kelamin dan suku. Prosedur *dummy coding* dilakukan terhadap kategori kelas sosial relatif (atas = 1, bawah = -1), prosedural (*voice* = 1, *no-voice* = -1), jenis kelamin (laki-laki = 1, perempuan = 0), dan suku (Jawa = 1, non-Jawa = 0). Menggunakan metode enter, peneliti menemukan bahwa kelas sosial relatif, prosedural, interaksi di antara keduanya, suku, dan jenis kelamin secara signifikan mempengaruhi penilaian keadilan prosedural, $F(5, 128) = 8.02, p < .001, R^2 = .24, R^2_{Adjusted} = .21, f^2 = .31$. Karena nilai f^2 mendekati nilai minimum efek yang besar (.35), maka dapat dinyatakan bahwa *effect size*-nya yang cukup besar.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa hanya variabel prosedural yang secara signifikan mempengaruhi penilaian keadilan prosedural, $\beta = .46, t(128) = 6.01, p < .001$. Sementara, kelas sosial relatif tidak signifikan mempengaruhi penilaian keadilan prosedural $\beta = -.08, t(128) = -.98, p = .33, ns$. sedangkan interaksi antara prosedural dan kelas sosial relatif tidak signifikan, $\beta = -.03, t(128) = .38, p = .71, ns$. Sementara, jenis kelamin dan suku tidak signifikan mempengaruhi penilaian keadilan prosedural ($t_s < 1.10, ns$). Hasil analisis regresi selengkapnya dapat dilihat di Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5.

Hasil Analisis Regresi yang Memprediksi Penilaian Keadilan Prosedural pada Prosedur Voice/No-Voice

Variabel	B	SE	β	T
Kelas sosial relatif (1= atas, -1=bawah)	-.137	.140	-.076	-.976
Prosedur (1=voice, -1=no-voice)	.842	.140	.468	6.010***
Kelas sosial relatif \times Prosedur	.052	.139	.029	.376
Jenis kelamin (1=laki-laki, 0=perempuan)	-.446	.412	-.085	-1.083
Suku (1=Jawa, 0=non-Jawa)	-.259	.279	-.072	-.928

* $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

Dengan demikian, karena kelas sosial relatif tidak signifikan mempengaruhi penilaian keadilan prosedural, H1 yang menyatakan bahwa ada pengaruh kelas sosial terhadap penilaian keadilan prosedural tidak didukung oleh data. Sementara, karena tidak ada pengaruh kelas sosial relatif dan tidak ada interaksi antara prosedur dan kelas sosial relatif, H2 yang menyatakan bahwa partisipan yang berada dalam kondisi kelas atas menunjukkan kepekaan penilaian keadilan prosedural yang lebih besar berkenaan dengan prosedur pengambilan keputusan dibanding partisipan yang berada pada kondisi kelas bawah tidak didukung oleh data.

Pada tahap akhir analisis dilakukan uji asumsi normalitas. Uji normalitas residual berdasarkan histogram dan *normal probability plot* tampak bahwa data terdistribusi normal. Untuk mengkonfirmasi dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap *standardized residuals* dan menunjukkan nilai $p = .27$. Karena nilai $p > .05$, dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal.

BAB 4

STUDI 2

Studi 2 dilakukan untuk menguji hipotesis (H3) bahwa dibandingkan dengan partisipan dalam kondisi kelas atas, partisipan dalam kondisi kelas bawah menunjukkan tingkat penilaian keadilan prosedural yang lebih rendah saat orang lain mengalami prosedur pengambilan keputusan yang tidak adil. Dengan kata lain, apakah partisipan dalam kondisi kelas bawah lebih menunjukkan kepekaan penilaian keadilan prosedural saat orang lain mengalami ketidakadilan dalam prosedur pengambilan keputusan.

4.1. Metode

4.1.1. Partisipan dan Desain

Partisipan dalam studi 2 adalah 111 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (37 laki-laki dan 74 perempuan). Usia partisipan antara 17 sampai 20 tahun ($M_{age} = 18.0$ tahun). Pendidikan orangtua partisipan mulai dari tidak sekolah/tidak tamat SD sampai S3 dengan rata-rata pendidikan SMA/ sederajat. Sementara pendapatan orangtua partisipan mulai dari di bawah 1 juta rupiah/bulan sampai lebih dari 15 juta rupiah/bulan dengan rata-rata pendapatan orangtua 3,5 juta sampai 5 juta rupiah/bulan.

Studi 2 menggunakan rancangan eksperimental dengan desain faktorial 2 (kelas sosial relatif: kelas atas vs kelas bawah) x 2 (prosedur pengambilan keputusan: diri dan orang lain akurat vs diri akurat dan orang lain tidak akurat). Desain menggunakan *between-subjects design*. Gambaran partisipan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1.

Gambaran Partisipan dan Kondisi Berdasarkan Variabel Penelitian

	Rata-rata	SD
Usia (tahun)	18	.51
	<i>N</i>	% dari total
Jenis Kelamin		
Laki-laki	37	33,3
Perempuan	74	66,7
Kondisi		
Kelas sosial atas – <i>Accurate</i>	28	25.2
Kelas sosial atas – <i>Unaccurate</i>	28	25.2
Kelas sosial bawah – <i>Accurate</i>	28	25.2
Kelas sosial bawah – <i>Unaccurate</i>	27	24.4
	Rata-rata	SD
SES		
Pendapatan orangtua	3.75	1.63
Pendidikan orangtua	4.27	1.11

Note. Pendapatan orangtua/bulan: 1 = kurang dari 1 juta, 2 = 1 - 2 juta, 3 = 2 - 3,5 juta, 4 = 3,5 - 5 juta, 5 = 5 - 7,5 juta, 6 = 7,5 - 10 juta, 7 = 10 - 15 juta, 8 = lebih dari 15 juta. Pendidikan orangtua: 1 = tidak sekolah/tidak tamat SD, 2 = SD, 3 = SMP, 4 = SMA/SMK, 5 = Diploma I-II-III, 6 = S-1, 7 = S-2, 8 = S-3.

4.1.2. Variabel dan Pengukuran**4.1.2.1 *Dependent Variable (DV)***

DV pada studi 2 sama dengan DV pada studi 1, yakni penilaian keadilan prosedural. Pengukuran penilaian keadilan prosedural juga sama dengan yang digunakan pada studi 1. Uji reliabilitas pengukuran penilaian keadilan prosedural menunjukkan Alpha Cronbach = .92, tergolong sangat reliabel.

4.1.2.2 *Independent Variable (IV)*

IV pada studi 2 sama dengan yang digunakan pada studi 1, yakni kelas sosial relatif dan prosedur pengambilan keputusan. Jika elemen prosedur pengambilan keputusan yang digunakan dalam studi 1 adalah aspirasi (*voice*), pada studi 2 elemen yang digunakan adalah akurasi.

Pada studi 2, partisipan dibagi dalam dua prosedur pengambilan keputusan, yakni kondisi diri-orang lain akurat dan kondisi diri akurat-orang lain tidak akurat. Skenario mengikuti skenario pada studi 1 dengan manipulasi diadaptasi dari Van Prooijen, et al. (2002) seperti berikut ini (kata yang dicetak miring masing-masing untuk kedua kondisi).

Koordinator tim akhirnya memutuskan akan membuat penilaian keseluruhan kinerja Anda dan teman Anda sebagai acuan dalam pembagian bonus. Ada 10 aktivitas kerja yang dilakukan Anda dan teman Anda. *Anda dan teman Anda akan dinilai berdasarkan 10 dari 10 aktivitas/Anda akan dinilai berdasarkan 10 dari 10 aktivitas namun teman Anda akan dinilai berdasarkan hanya 1 dari 10 aktivitas.*

Untuk mengecek keberhasilan manipulasi pengambilan keputusan prosedural berdasarkan akurasi, partisipan ditanya dengan pertanyaan berikut (1=tidak sama sekali, 7=sangat tepat): “Seberapa tepat koordinator tim dalam menilai aktivitas kerja Anda dan teman Anda yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembagian bonus?”

4.1.3. Prosedur Penelitian

Prosedur studi 2 identik dengan studi 1. Skenario yang digunakan sama dengan skenario pada studi 1. Perbedaannya pada manipulasi prosedur pengambilan keputusannya dan penilaian koordinator tim terhadap kinerja. Jika pada studi 1 menggunakan aspirasi sebagai prosedur pengambilan keputusan, pada skenario 2 menggunakan akurasi. Pada skenario akurasi penilaian kinerja, partisipan berada dalam dua kondisi, yakni penilaian koordinator tim akurat untuk partisipan dan temannya; dan penilaian koordinator tim akurat untuk partisipan tapi tidak akurat untuk temannya. Sehingga, pada studi 2 setiap partisipan berada dalam satu dari empat kelompok kondisi, yakni (1) kelas atas dan diri-orang lain akurat, (2) kelas atas dan diri akurat-orang lain tidak akurat, (3) kelas bawah dan diri-orang lain akurat, dan (4) kelas bawah dan diri akurat-orang lain tidak akurat.

Usai mendapat manipulasi kelas sosial, disamping mengisi pengukuran penilaian keadilan proseduralnya, partisipan menjawab pertanyaan tentang seberapa tepat penilaian yang dilakukan koordinator tim sebagai *manipulation check*. Kemudian partisipan mengisi data demografis berupa jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, suku, dan tingkat pendidikan dan pendapatan orangtua.

Terakhir, dilakukan *debriefing* terhadap partisipan dan peneliti mengucapkan terima kasih kepada partisipan atas kesediaannya terlibat dalam penelitian.

4.2. Hasil

4.2.1. Manipulation Check

Peneliti melakukan *manipulation check* untuk mengetahui apakah manipulasi kelas sosial yang dilakukan partisipan berhasil. Peneliti membandingkan rata-rata kelas sosial subjektif antara partisipan yang dimanipulasi kelas sosial atas dan partisipan yang dimanipulasi kelas sosial bawah menggunakan *independent sample t-test*. Partisipan yang berada pada kelas sosial atas, yakni yang membandingkan dirinya dengan orang yang berada pada tangga paling bawah, menempatkan diri mereka lebih tinggi ($M = 6.05$, $SD = 1.58$) dibanding partisipan yang berada pada kelas sosial bawah ($M = 5.47$, $SD = 1.23$), yakni yang membandingkan dirinya dengan orang yang berada pada kelas sosial atas, $t(109) = 2.161$, $p < .05$, $d = .41$. Hasil ini menegaskan bahwa manipulasi yang dilakukan berhasil mengubah pandangan partisipan terhadap kelas sosial relatifnya. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2.

Hasil Independent Sampe t-test Kelas Sosial Subjektif Berdasarkan Manipulasi Kelas Sosial

Hasil	Manipulasi Kelas Sosial						95% CI for		
	Atas			Bawah			Mean Difference	t	Df
	M	SD	N	M	SD	n			
Kelas sosial subjektif	6.05	1.58	56	5.47	1.23	55	0.05, 1.11	2.16*	109

* $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

Untuk mengetahui keberhasilan manipulasi prosedur pengambilan keputusan, peneliti melakukan analisis 2 (kelas sosial relatif) x 2 (prosedur) ANOVA terhadap skala pengecekan prosedur. Hasilnya menunjukkan bahwa *main effect* hanya pada prosedur, $F(1, 109) = 18.19$, $p < .01$. Partisipan yang berada pada kondisi diri dan temannya dinilai akurat (*accurate*) memandang bawah koordinator tim telah memberikan penilaian secara tepat ($M = 5.11$, $SD = 1.26$) dibanding partisipan yang berada pada kondisi dirinya dinilai akurat

sementara temannya dinilai tidak akurat (*unaccurate*, $M = 3.78$, $SD = 1.93$). Hasil ini menunjukkan bahwa manipulasi prosedur berhasil. Hasil ANOVA skala pengecekan prosedur dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3.

Hasil Two-Way ANOVA Memprediksi Skala Pengecekan Prosedur berdasarkan Kelas Sosial dan Prosedur

Sumber	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Kelas sosial relatif	3.552	1	3.552	1.335	.250
Prosedur	48.396	1	48.396	18.193	.000
Kelas sosial \times Prosedur	.571	1	.571	.215	.644
Total	2536.000	111			

4.2.2. Kepekaan Penilaian Keadilan Prosedural yang Menimpa Orang Lain

Untuk menguji hipotesis ketiga (H3), peneliti melakukan uji *independent sample t-test*. Hasil uji *independent sample t-test* secara keseluruhan pada dua kondisi prosedur menunjukkan bahwa penilaian keadilan prosedural partisipan yang berada pada kondisi kelas atas lebih rendah ($M = 4.17$, $SD = 1.73$) dibandingkan dengan partisipan yang berada pada kondisi kelas bawah ($M = 4.58$, $SD = 1.83$), $t(109) = -1.19$, $p = .24$, *ns*. Pada kondisi akurat, penilaian keadilan prosedural partisipan yang berada pada kondisi kelas atas lebih rendah ($M = 5.05$, $SD = 1.03$) dibandingkan dengan partisipan yang berada pada kondisi kelas bawah ($M = 5.19$, $SD = 1.37$), $t(54) = -.44$, $p = .66$, *ns*. Pada kondisi tidak akurat juga menunjukkan penilaian keadilan prosedural partisipan dalam kondisi kelas atas lebih rendah ($M = 3.30$, $SD = 1.86$) dibanding partisipan yang berada pada kondisi kelas bawah ($M = 3.94$, $SD = 2.04$), $t(53) = -1.22$, $p = .23$, *ns*. Hal ini menunjukkan bahwa, saat mendapat perlakuan prosedur pengambilan keputusan yang akurat (adil untuk diri sendiri dan orang lain) maupun tidak akurat (adil untuk diri sendiri dan tidak adil untuk orang lain), tidak ada perbedaan signifikan dalam penilaian keadilan prosedural antara partisipan pada kondisi kelas atas dan partisipan pada kondisi kelas bawah. Hasil *independent sample t-test* penilaian keadilan prosedural pada kondisi akurat, tidak akurat, dan keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4.

Hasil Independent Sampe t-test Penilaian Keadilan Prosedural pada Kondisi Akurat, Tidak Akurat, dan Keseluruhan

Hasil	Manipulasi Kelas Sosial						95% CI for		
	Atas			Bawah			Mean Difference	t	df
	M	SD	N	M	SD	n			
Akurat	5.05	1.03	28	5.19	1.37	28	-0.79, 0.51	-0.44	54
Tidak akurat	3.30	1.86	28	3.94	2.04	27	-1.70, 0.41	-1.22	53
Keseluruhan	4.17	1.73	56	4.58	1.83	55	-1.07, 0.27	-1.19	109

Kemudian peneliti melakukan analisis regresi linier berganda dengan meregresikan penilaian keadilan prosedural terhadap kelas sosial relatif, prosedur (akurat dan tidak akurat), dan interaksi di antara keduanya, suku, dan jenis kelamin. Prosedur *dummy coding* dilakukan terhadap kategori kelas sosial relatif (atas = 1, bawah = -1), prosedur (akurat = 1, tidak akurat = -1), jenis kelamin (laki-laki = 1, perempuan = 0), dan suku (Jawa = 1, non-Jawa = 0). Menggunakan metode enter, peneliti menemukan bahwa kelas sosial relatif, prosedur, interaksi di antara keduanya, suku, dan jenis kelamin secara signifikan mempengaruhi penilaian keadilan prosedural, $F(5, 103) = 5.16, p < .01, R^2 = .20, R^2_{Adjusted} = .16, f^2 = .25$. Karena nilai f^2 melebihi nilai minimum efek yang sedang (.15), maka dapat dinyatakan bahwa *effect size*-nya sedang.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa hanya variabel prosedur yang secara signifikan mempengaruhi penilaian keadilan prosedural, $\beta = .44, t(103) = 4.90, p < .001$. Sementara, kelas sosial relatif tidak signifikan mempengaruhi penilaian keadilan prosedural $\beta = -.10, t(103) = -1.18, p = .24, ns$. sedangkan interaksi antara prosedur dan kelas sosial relatif tidak signifikan, $\beta = -.06, t(103) = .40, p = .69, ns$. Sementara, jenis kelamin dan suku tidak signifikan mempengaruhi penilaian keadilan prosedural ($ts < 1.2, ns$). Hasil analisis regresi selengkapnya dapat dilihat di Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5.

Hasil Analisis Regresi yang Memprediksi Penilaian Keadilan Prosedural pada Prosedur Akurat/Tidak Akurat

Variabel	B	SE	β	t
Kelas sosial relatif (1= atas, -1=bawah)	-.184	.155	-.104	-1.182
Prosedur (1=akurat, -1=tidak akurat)	.778	.159	.441	4.898***
Kelas sosial relatif \times Prosedur	.063	.158	.036	.399
Jenis kelamin (1=laki-laki, 0=perempuan)	.178	.334	.047	.532
Suku (1=Jawa, 0=non-Jawa)	-.378	.321	-.107	-1.175

* $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

Dengan demikian, karena tidak ada pengaruh kelas sosial relatif dan tidak ada interaksi antara prosedur dan kelas sosial relatif, H3 yang menyatakan bahwa dibanding partisipan pada kondisi kelas atas, partisipan dalam kondisi kelas bawah menunjukkan kepekaan penilaian keadilan prosedural yang lebih besar saat orang lain mengalami prosedur pengambilan keputusan yang tidak adil tidak didukung oleh data.

Pada tahap akhir analisis dilakukan uji asumsi normalitas. Uji normalitas residual berdasarkan histogram dan *normal probability plot* tampak bahwa data terdistribusi normal. Untuk mengkonfirmasi dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap *standardized residuals* dan menunjukkan nilai $p = .28$. Karena nilai $p > .05$, dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal.

BAB 5

DISKUSI, KESIMPULAN, DAN SARAN

5.1. Diskusi

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tidak ada pengaruh signifikan kelas sosial partisipan terhadap penilaiannya atas keadilan prosedural saat menghadapi prosedur pengambilan keputusan, baik prosedur aspirasi (*voice/no-voice*, studi 1) maupun prosedur akurasi (akurat/tidak akurat, studi 2). Partisipan pada kelas sosial atas tidak lebih peka dibanding partisipan kelas sosial bawah dalam penilaian keadilan prosedural yang menimpa diri sendiri (studi 1). Sedangkan partisipan pada kelas sosial bawah tidak lebih peka dibanding partisipan kelas sosial atas dalam menilai ketidakadilan prosedural yang menimpa orang lain (studi 2).

Penelitian ini berhasil mengkonfirmasi penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengaruh prosedur pengambilan keputusan terhadap penilaian keadilan prosedural. Pada penelitian ini, partisipan yang mendapat kesempatan menyampaikan pendapat (*voice*) menunjukkan penilaian keadilan prosedural yang lebih tinggi dibandingkan partisipan yang tidak mendapat kesempatan menyampaikan pendapat (*no-voice*, studi 1). Dalam hal ini ada efek aspirasi (*voice effect*), yakni bahwa adanya aspirasi (*voice*) bisa meningkatkan penilaian keadilan prosedural (Folger, 1977; Lind, Kanfer, & Earley, 1990). Demikian juga, partisipan yang mendapat penilaian yang akurat dalam suatu proses pengambilan keputusan menunjukkan penilaian keadilan prosedural yang lebih tinggi dibandingkan partisipan yang tidak mendapat penilaian yang akurat (studi 2). Akurasi berpengaruh dalam penilaian keadilan prosedural terutama saat digunakan sebagai prosedur dalam mendapat informasi yang akan digunakan dalam memberikan hadiah atau bonus (Leventhal, 1980).

Berbagai penelitian tentang kelas sosial menguatkan tentang pentingnya peringkat kelas sosial (*social class rank*) dalam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik pikiran, perasaan, dan perilaku (Kraus, et al, 2011; Kraus, et al, 2012; Kraus, et al, 2013). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kelas sosial seseorang mempengaruhi aspek kognisi, khususnya terkait cara dalam melakukan

penjelasan sosial (Kraus, et al., 2009; Kraus, et al., 2012). Namun, kelas sosial seseorang tidak mempengaruhi semua aspek kognisi. Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa kelas sosial tidak berpengaruh saat orang melakukan penilaian terhadap prosedur pengambilan keputusan yang dialami. Dengan kata lain, dalam penelitian ini kelas sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural.

Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam memandang kelas sosial dan fenomena sosial yang terkait berdasarkan sudut pandang peringkat kelas sosial (*social class rank-based perspective*). Walaupun orang dari peringkat kelas sosial tertentu menunjukkan adanya kesamaan dalam pola pikiran, perasaan, dan perilaku, mereka yang berada pada peringkat kelas sosial yang sama tersebut tidak memiliki pengalaman hidup yang setara (Stephens & Townsend, 2013). Dengan demikian, walaupun orang-orang yang hidup sederhana, para pekerja kasar, dan orang-orang yang tidak berpendidikan sama-sama berada pada tingkat kelas sosial bawah, masing-masing dari mereka tumbuh dalam konteks sosial-budaya yang berbeda-beda. Perbedaan konteks sosial-budaya inilah yang mempengaruhi orang dalam memahami dirinya dan bagaimana dirinya berperilaku saat berinteraksi dengan orang lain.

Dengan demikian, temuan bahwa kelas sosial seseorang tidak mempengaruhi penilaian keadilan prosedural bisa disebabkan oleh keterbatasan dalam memandang kelas sosial berdasarkan peringkat. Meskipun orang yang berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi dan berpendidikan rendah merasa berada pada peringkat ekonomi bawah, pengalaman mereka terhadap prosedur pengambilan keputusan berbeda-beda.

Berdasarkan konteks sosial-budaya, kelas sosial tidak hanya dipandang dari perbedaan peringkat kelas sosial tertentu (kelas atas atau kelas bawah), tapi juga berdasarkan sumber daya materi yang dimiliki, hambatan sosial yang dialami, dan jejaring sosial yang dijalin (Stephens & Townsend, 2013). Misalnya, alih-alih memandang orang yang status pekerjaannya rendah berada dalam tingkat kelas sosial bawah, orang yang berada pada pekerjaan ini memiliki kecenderungan tertentu yang muncul akibat keterbatasan sumber daya materi, seperti menggantungkan kebutuhan materinya pada sokongan dan bantuan orang lain,

lebih mudah menyesuaikan lingkungan, dan menunjukkan pola pemaknaan diri interdependen (Stephens, Markus, & Townsend, 2007). Jadi temuan bahwa kelas sosial seseorang tidak berpengaruh terhadap penilaian keadilan prosedural mungkin disebabkan oleh keterbatasan sudut pandang kelas sosial yang menempatkan orang dalam kelas sosial tertentu namun tidak memandang latar belakang sosial dan budaya di mana seseorang berada serta apa yang dialaminya sehari-hari.

Tidak adanya perbedaan penilaian keadilan prosedural antara partisipan dari kelas sosial atas dan partisipan dari kelas sosial bawah saat mendapat perlakuan prosedur *voice* atau *no-voice* menunjukkan bahwa penilaian keadilan prosedural tidak memandang latar belakang kelas sosial relatif seseorang. Orang dari kelas sosial atas yang lebih *self-interest*, *self-oriented*, dan utilitarian sehingga diharapkan lebih peka dalam penilaian keadilan prosedural tidak ditemukan dalam penelitian ini. Keadaan ini mungkin tidak lepas dari dua proses yang terjadi dalam pengambilan keputusan melalui *voice*, yakni proses instrumental dan non-instrumental. Orang kelas sosial atas tidak menunjukkan kepekaan yang lebih besar pada penilaian keadilan prosedural dibanding orang dari kelas bawah karena prosedur *voice* dan *no-voice* tidak hanya terkait proses yang bersifat instrumental, tapi juga relasional. Apakah orang kelas sosial atas memandang prosedur *voice* dan *no-voice* lebih sebagai proses yang bersifat instrumental sedangkan orang kelas sosial bawah memandangnya sebagai proses yang bersifat relasional membutuhkan penelitian tersendiri.

Partisipan dari kelas sosial bawah tidak menunjukkan kepekaan yang lebih besar saat orang lain mengalami prosedur pengambilan keputusan yang tidak adil. Partisipan dari kelas bawah yang lebih dependen, prososial, dan berfokus pada orang lain sehingga diharapkan lebih peka dalam penilaian keadilan prosedural saat mengetahui orang lain mendapat perlakuan tidak adil tidak ditemukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, tidak ada pengaruh kelas sosial relatif terhadap penilaian keadilan prosedural saat menghadapi prosedur yang tidak adil yang menimpa orang lain. Tidak adanya pengaruh kelas sosial relatif ini membuat perlu meninjau kembali peran peringkat kelas sosial dalam mempengaruhi proses psikologis dalam berbagai aspek kehidupan. Kelas sosial memiliki pengaruh besar

dalam proses kognisi seseorang, namun proses menangkap sinyal kelas sosial yang ditunjukkan dengan bagaimana seseorang menempatkan dirinya dalam tangga kelas sosial bukanlah satu-satunya cara bagaimana kelas sosial mempengaruhi berbagai proses psikologis (Grossmann & Huynh, 2013).

Penelitian kelas sosial berdasarkan peringkat tangga kelas sosial yang banyak dilakukan oleh Kraus dan koleganya mendapat catatan terkait sampel yang digunakan (Grossmann & Huynh, 2013). Sampel pada penelitian tentang peringkat kelas sosial mengandung kriteria subjek yang banyak dilakukan dalam studi psikologi, yakni Barat, berpendidikan, terindustrialisasi, kaya, dan demokratis (WEIRD: *Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic*). Menurut Grossmann dan Huynh (2013), penelitian yang dilakukan oleh Kraus dan koleganya melibatkan mahasiswa di Amerika Utara dimana sensitivitas terhadap peringkat kelas lebih menonjol. Penelitian tentang pengaruh kelas sosial terhadap pola kognisi seharusnya juga melibatkan sampel di luar kriteria di atas.

Namun demikian, peneliti menyadari adanya kelemahan yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, partisipan yang terlibat berasal dari keluarga dengan kelas sosial objektif menengah ke bawah (rata-rata pendidikan orangtua SMA/ sederajat dan pendapatan di bawah 5 juta rupiah/bulan). Apakah latar belakang kelas sosial objektif partisipan berpengaruh terhadap hasil penelitian membutuhkan studi lain yang melibatkan partisipan dari kelas sosial atas. Peneliti juga mencatat adanya kelemahan dalam manipulasi prosedur yang digunakan. Manipulasi prosedur dengan skenario hipotetikal membuat partisipan kurang merasakan adanya perlakuan prosedur yang ditimpakan kepadanya. Hal ini tentu akan menyebabkan respon sikap yang diharapkan kurang bisa ditangkap melalui pengukuran. Kelemahan lain dalam penelitian ini ada pada variabel dependen yang diukur, dalam hal ini penilaian keadilan prosedural, yang lebih berupa sikap, bukan perilaku. Penilaian atas sesuatu apakah sesuatu itu adil atau tidak adil lebih bersifat abstrak dibandingkan, misalnya, menentukan perilaku (baik adil atau tidak adil) apa yang akan dilakukan.

5.2. Kesimpulan

Pandangan bahwa kelas sosial seseorang mempengaruhi berbagai proses psikologis, termasuk kognisi, telah ditemukan dalam berbagai penelitian. Namun, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, proses kognisi seseorang dalam menilai keadilan prosedural tidak dipengaruhi oleh kelas sosial subjektif. Penelitian ini menemukan bahwa, saat dihadapkan pada suatu proses pengambilan keputusan, partisipan pada kelas sosial atas dan partisipan pada kelas sosial bawah tidak menunjukkan perbedaan dalam penilaian keadilan prosedural. Sehingga, hipotesis bahwa partisipan dari kelas sosial atas lebih peka dalam penilaian keadilan prosedural dibanding partisipan kelas bawah dan partisipan dari kelas sosial bawah lebih peka dalam menilai ketidakadilan yang dialami orang lain dibanding partisipan kelas sosial atas tidak didukung oleh data dalam penelitian ini. Peneliti menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh kelas sosial terhadap penilaian keadilan prosedural karena ada keterbatasan dalam memandang kelas sosial hanya berdasarkan peringkat kelas sosial dan mengabaikan aspek sosial budaya.

5.3. Saran

Peneliti menyampaikan saran agar penelitian tentang kelas sosial berdasarkan peringkat kelas sosial dapat melibatkan banyak partisipan dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Ini agar hasil penelitian yang mengungkap kecenderungan pikiran, perasaan, dan perilaku berdasarkan kelas sosial dapat berlaku pada populasi yang lebih luas. Mengingat adanya bias dalam memilih partisipan pada berbagai penelitian terdahulu tentang kelas sosial berdasarkan peringkat dan pengaruhnya terhadap berbagai proses psikologis, perlu kiranya dilakukan penelitian replikasi dengan melibatkan partisipan di Indonesia.

Terkait saran untuk penelitian lanjutan terkait kelas sosial subjektif dan keadilan prosedural, perlu dibuat desain penelitian laboratorium yang lebih bisa memanipulasi prosedur pengambilan keputusan sehingga perlakuan adil dan tidak adil dapat dirasakan secara lebih nyata. Perlu dicari pula alternatif instrumen dan prosedur dalam melakukan manipulasi kelas sosial subjektif yang lain selain manipulasi kelas sosial relatif yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Terkait

partisipan yang dilibatkan dalam penelitian tentang kelas sosial subjektif, penelitian diharapkan melibatkan partisipan yang berasal dari latar belakang kelas sosial objektif yang lebih bervariasi, baik dari kelas atas maupun kelas bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, N. E., Boyce, T., Chesney, M. A., Cohen, S., Folkman, S., Kahn, R. L., & Syme, S. L., (1994). Socioeconomic status and health: The challenge of the gradient. *American Psychologist*, 49 (1), 15-24.
- Adler, N. E., Epel, E. S., Castellazzo, G., & Ickovics, J. R. (2000). Relationship of subjective and objective social class with psychological functioning: Preliminary data in healthy White women. *Health Psychology*, 19, 586-592.
- Anna, L. K. (2012, 28 September). Pasien Miskin Mendapat Layanan Diskriminatif. *Kompas.com*. Diperoleh pada 29 Desember 2014 dari <http://m.kompas.com/health/read/2012/09/28/11094194/Pasien.Miskin.Mendapat.Layanan>
- Barret-Howard, E., & Tyler, T. R. (1986). Procedural justice as a criterion in allocation decision. *Journal of Personality and Social Psychology*, 50, 296-304.
- Blader, S. L., & Tyler, T. R. (2003). A four-component model of procedural justice: Defining the meaning of a “fair” process. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 29, 747-758.
- Cote, S. (2011). How social class shapes thoughts and actions in organizations. *Research in Organizational Behavior*.
- Cote, S., Piff, P. K., & Willer, R. (2013). For whom do the ends justify the means? Social class and utilitarian moral judgment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 104 (3), 490-503.
- Fiske, S. T. (2010). Interpersonal stratification: Status, power, and subordination. Dalam S. T. Fiske, D. T. Gilbert & G. Lindzey (Eds.) *Handbook of Social Psychology, Volume 1*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Fiske, S. T., & Markus, H. R. (2011). *Facing Social Class: How Societal Rank Influences Interaction*. New York: Russel Sage Foundation.
- Folger, R. (1977). Distributive and procedural justice: Combined impact of “voice” and improvement on experienced inequity. *Journal of Personality and Social Psychology*, 35, 108-119.
- Goodman, E., Adler, N. E., Kawachi, I., Frazier, A. L., Huang, B., & Colditz, G. A. (2001). Adolescents’ perceptions of social status: Development and evaluation of a new indicator. *Pediatrics*, 108, 1-8.

- Grossmann, I & Huynh, A. C. (2013). Where is the culture in social class? *Psychological Inquiry*, 24(2), 112-119.
- Khumaini, M. A. (2014, 28 Maret). Pemohon paspor protes permainan Kantor Imigrasi Karawang. *Antaraneews.com*. Diperoleh pada 14 Desember 2014 dari <http://m.antaraneews.com/berita/426409/pemohon-paspor-protes-permainan-kantor-imigrasi-karawang>
- Kitayama, S., Duffy, S., & Uchida, Y. (2007). Self as cultural mode of being. Dalam S. Kitayama & D. Cohen (Ed.). *Handbook of Cultural Psychology*. New York: The Guilford Press.
- Kraus, M. W., & Keltner, D. (2009). Signs of socioeconomic status: A thin-slicing approach. *Psychological Science*, 20, 99-106.
- Kraus, M. W., & Keltner, D. (2013). Social class rank, essentialism, and punitive judgment. *Journal of Personality and Social Psychology*. Advance online publication. doi: 10.1037/a0032895.
- Kraus, M. W., & Stephens, N. M. (2012). A road map for an emerging psychology of social class. *Social and Personality Psychology Compass*, 6 (9), 642-656.
- Kraus, M. W., Côté, S., & Keltner, D. (2010). Social class, contextualism, and empathic accuracy. *Psychological Science*, 21, 1716-1723.
- Kraus, M. W., Piff, P. K., & Keltner, D. (2009). Social class, sense of control, and social explanation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 97, 992-1004.
- Kraus, M. W., Piff, P. K., & Keltner, D. (2011). Social class as culture: The convergence of resources and rank in the social realm. *Current Directions in Psychological Science*, 20, 246-250.
- Kraus, M. W., Piff, P. K., Mendoza-Denton, R., Rheinschmidt, M. L., & Keltner, D. (2012). Social class, solipsism, and contextualism: How the rich are different from the poor. *Psychological Review*, 119, 546-572.
- Kraus, M. W., Tan, J. J. X., & Tannenbaum, M. T. (2013). The social ladder: A rank-based perspective on social class. *Psychological Inquiry*. 24 (2), 81-96.
- Lachman, M. E., & Weaver, S. L. (1998). The sense of control as a moderator of social class differences in health and well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 74, 763-773.
- Leventhal, G. S. (1980). What should be done with equity theory? New approach to the study of fairness in social relationships. Dalam K. Gergen, M. Greenberg, & R. Willis (Eds.). *Social Exchange: Advances in Theory and Research*. New York: Plenum.

- Lind, E. A., & Tyler, T. R. (1988). *The Social Psychology of Procedural Justice*. New York: Plenum.
- Lind, E. A., Kanfer, R., & Earley, P. C. (1990). Voice, control, and procedural justice: Instrumental and noninstrumental concerns in fairness judgments. *Journal of Personality and Social Psychology, 59*, 952-959.
- Lind, E. A., Kray, L., & Thompson, L. (1998). The social construction of injustice: Fairness judgments in response to own and others' unfair treatment by authorities. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 75* (1), 1-22.
- MacCoun, R. J. (2005). Voice, control, and belonging: The double-edged sword of procedural fairness. *Annual Review of Law and Social Science, 1*, 171-201.
- Markus, H. R., & Kitayama, S. (2003). Culture, self, and the reality of the social. *Psychological Inquiry, 14*, 277-283.
- Markus, H. R., & Kitayama, S. (2010). Cultures and selves: A cycle of mutual constitution. *Perspectives on Psychological Science, 5*, 420-430.
- Oakes, J. M., & Rossi, R. H. (2003). The measurement of SES in health research: Current practice and steps toward a new approach. *Social Science and Medicine, 56*, 769-784.
- Piff, P. K. (2014). Wealth and the inflated self: Class, entitlement, and narcissism. *Personality and Social Psychology Bulletin, 40* (1), 34-43.
- Piff, P. K., Kraus, M. W., Côté, S., Cheng, B. H., & Keltner, D. (2010). Having less, giving more: The influence of social class on prosocial behavior. *Journal of Personality and Social Psychology, 99*, 771-784.
- Piff, P. K., Stancato, D. M., Côté, S., Mendoza-Denton, R., & Keltner, D. (2012). Higher social class predicts increased unethical behavior. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 109*, 4086-4091.
- Sedikides, C., Hart, C.M., & De Cremer, D. (2008). The self in procedural fairness. *Social and Personality Psychology Compass, 2/6*, 2107-2124.
- Snibbe, A. C., & Markus, H. R. (2005). You can't always get what you want: Educational attainment, agency, and choice. *Journal of Personality and Social Psychology, 88*, 703-720.
- Stellar, J. E., Manzo, V. M. Kraus, M.W., & Keltner, D. (2011). Class and compassion: Socioeconomic factors predict responses to suffering. DOI: 10.1037/a0026508.

- Stephens, N. M., & Townsend, S. S. M. (2013). Rank is not enough: Why we need a sociocultural perspective to understand social class. *Psychological Inquiry, 24*, 126-130.
- Stephens, N. M., Markus, H. R., Townsend, S. S. M. (2007). Choice as an Act of Meaning: The Case of Social Class. *Journal of Personality and Social Psychology, 93*, (5), 814-830.
- Thibaut, J., & Walker, L. (1978). A theory of procedure. *California Law Review, 66* (3), 541-566.
- Triandis, H.C., & Gelfand, M.J. (2012). A Theory of Individualism and Collectivism. Dalam P.A.M. Van Lange, A.W. Kruglanski, & E.T. Higgins (Eds). *Handbook of Theories of Social Psychology Volume 2*. Los Angeles: Sage.
- Tyler, T. R. (2004). Procedural justice. Dalam A. Sarat (Ed.). *The Blackwell Companion to Law and Society*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Tyler, T. R. (2012). Justice Theory. Dalam P.A.M. Van Lange, A.W. Kruglanski, & E.T. Higgins (Eds). *Handbook of Theories of Social Psychology Volume 2*. Los Angeles: Sage.
- Tyler, T. R., & Smith, H. J. (1995). Social Justice and Social Movements. Makalah yang dipublikasikan oleh Institute for Research on Labor and Employment UC Berkeley.
- Tyler, T. R., Boeckmann, R. J., Smith, H. J., & Hou, Y. J. (1997). *Social Justice in A Diverse Society*. Colorado: Westview Press.
- Van den Bos, K. (1999). What are we talking about when we talk about no-voice procedures? On the psychology of the fair outcome effect. *Journal of Experimental Social Psychology, 35*, 560-577.
- Van den Bos, K., & Van Prooijen, J.-W. (2001). Referent cognitions theory: The psychology of voice depends on closeness of reference points. *Journal of Personality and Social Psychology, 81*, 616-626.
- Van Prooijen, J.-W. & F. Zwenk. (2009). Self-construal level and voice procedures: the individual self as psychological basis for procedural fairness effects. *Journal of Experimental Social Psychology, 45*, 392-397.
- Van Prooijen, J.-W. (2013). Individualistic and social motives for justice judgments. *Annals of the New York Academy of Sciences, 1299*, 60-67.
- Van Prooijen, J.-W., De Cremer, D., Van Beest, I., Stahl, T., van Dijke, M., & van Lange, P.A.M. (2008). The egocentric nature of procedural justice: social value orientation as

- moderator of reactions to decision-making procedures. *Journal of Experimental Social Psychology*, 44, 1303-1315.
- Van Prooijen, J.-W., Stahl, T., Eek, D., & Van Lange, P.A.M. (2012). Injustice for all or just for me? Social value orientation predicts responses to own versus other's procedures. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 38(10), 1247-1258.
- Van Prooijen, J.-W., Van den Bos, K., & Wilke, H. A. M. (2002). Procedural justice and status: Status salience as antecedent of procedural fairness effects. *Journal of Personality and Social Psychology*, 83, 1353-1361.
- Van Prooijen, J.-W., Van den Bos, K., Lind, E. A., & Wilke, H. A. M. (2006). How do people react to negative procedures? On the moderating role of authority's biased attitudes. *Journal of Experimental Social Psychology*, 42, 632-645.
- Vermunt, R., Wit, A., Van den Bos, K., & Lind, E. A. (1996). The effects of unfair procedure on negative affect and protest. *Social Justice Research*, 9 (2), 109-119.
- Walker, L., LaTour, S., Lind, E. A., & Thibaut, J. (1974). Reactions of participants and observers to modes of adjudication. *Journal of Applied Social Psychology*, 4 (4), 295-310.
- Wendorf, C. A., Alexander, S., & Firestone, I. J. (2002). Social justice and moral reasoning: An empirical integration of two paradigms in psychological research. *Social Justice Research*, 15, 19-39.

Penelitian tentang Persepsi Sosial

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang persepsi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, Anda diminta untuk membandingkan diri Anda dengan orang yang berada dalam kelas sosial tertentu. Kemudian Anda diminta memberikan penilaian tertentu seandainya Anda mendapat perlakuan adil atau tidak adil. Anda diharapkan dapat mengerjakan semua tugas dan pertanyaan dalam penelitian ini. Jika ada pertanyaan terkait penelitian ini, Anda dapat menghubungi saya melalui email abubakarfahmi@yahoo.com

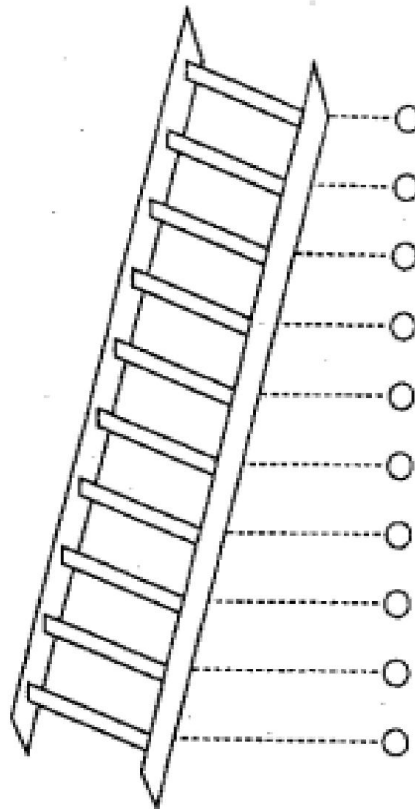
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Saya telah mendapat informasi tentang garis besar penelitian ini. Partisipasi saya bersifat sukarela sehingga saya berhak mengundurkan diri kapan saja selama penelitian ini, dan semua data yang saya berikan bersifat rahasia.

Tanggal : 2014

Tertanda,

(Tanda tangan)

Form Bagian A



1. Perhatikan gambar tangga dengan 10 (sepuluh) anak tangga di atas. Bayangkan tangga dengan 10 anak tangga tersebut merupakan gambaran tentang keberadaan masyarakat Indonesia.

Sekarang, bandingkanlah diri Anda dengan orang yang berada pada tangga **paling bawah**. Mereka adalah orang yang **paling buruk**, yakni orang yang punya **paling sedikit uang, paling rendah pendidikannya, dan paling rendah status pekerjaannya**. Kami meminta Anda untuk berpikir bahwa Anda **berbeda** dengan orang tersebut dalam hal **keuangan, riwayat pendidikan, dan status pekerjaan**. Di mana Anda akan menempatkan diri Anda dalam tangga tersebut jika dibandingkan dengan orang yang berada pada tangga paling bawah? Hitamkan pada salah satu lingkaran yang menunjuk anak tangga tertentu.

2. Sekarang bayangkan Anda sedang berkenalan dengan seseorang yang berada pada **tangga paling bawah**. Coba pikirkan bagaimana perbedaan di antara Anda dan kenalan Anda tersebut berdampak pada apa yang akan Anda obrolkan, apa yang akan Anda katakan dalam percakapan itu, dan akan seperti apa interaksi itu berlangsung. Tulislah minimal 2 kalimat pada tiap item pertanyaan di bawah ini.

Tentang apa saja (tema) yang akan Anda obrolkan?

Apa yang akan Anda katakan dalam percakapan itu?

Bagaimana interaksi itu berlangsung?

Identitas Anda

Jenis kelamin : laki-laki perempuan

Umur : tahun

Suku :

Pekerjaan orangtua : Ayah :

Ibu :

Pendidikan orangtua :

Ayah

Ibu

tidak sekolah/tidak tamat SD

tidak sekolah/tidak tamat SD

SD

SD

SMP

SMP

SMA/SMK

SMA/SMK

Diploma I, II, III

Diploma I, II, III

S-1

S-1

S-2

S-2

S-3

S-3

Pendapatan keluarga (ayah dan ibu) :

kurang dari 1 juta/bulan

antara 5 - 7,5 juta/bulan

antara 1 - 2 juta/bulan

antara 7,5 - 10 juta/bulan

antara 2 - 3,5 juta/bulan

antara 10 - 15 juta/bulan

antara 3,5 - 5 juta/bulan

lebih dari 15 juta/bulan

Contreng (√) pada tanda [] yang sesuai dengan diri Anda.

Terima kasih atas partisipasi Anda.

Penelitian tentang Persepsi Sosial

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang persepsi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, Anda diminta untuk membandingkan diri Anda dengan orang yang berada dalam kelas sosial tertentu. Kemudian Anda diminta memberikan penilaian tertentu seandainya Anda mendapat perlakuan adil atau tidak adil. Anda diharapkan dapat mengerjakan semua tugas dan pertanyaan dalam penelitian ini. Jika ada pertanyaan terkait penelitian ini, Anda dapat menghubungi saya melalui email abubakarfahmi@yahoo.com

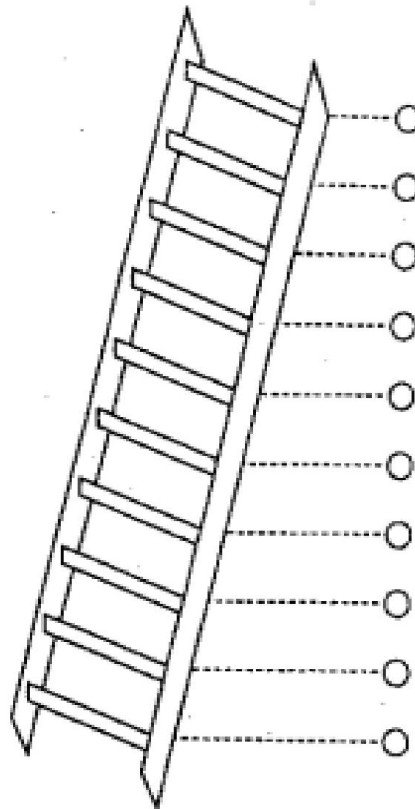
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Saya telah mendapat informasi tentang garis besar penelitian ini. Partisipasi saya bersifat sukarela sehingga saya berhak mengundurkan diri kapan saja selama penelitian ini, dan semua data yang saya berikan bersifat rahasia.

Tanggal : 2014

Tertanda,

(Tanda tangan)

Form Bagian A



3. Perhatikan gambar tangga dengan 10 (sepuluh) anak tangga di atas. Bayangkan tangga dengan 10 anak tangga tersebut merupakan gambaran tentang keberadaan masyarakat Indonesia.

Sekarang, bandingkanlah diri Anda dengan orang yang berada pada tangga **paling atas**. Mereka adalah orang yang **paling baik**, yakni orang yang punya **paling banyak uang, paling tinggi pendidikannya, dan paling tinggi status pekerjaannya**. Kami meminta Anda untuk berpikir bahwa Anda **berbeda** dengan orang tersebut dalam hal **keuangan, riwayat pendidikan, dan status pekerjaan**. Di mana Anda akan menempatkan diri Anda dalam tangga tersebut jika dibandingkan dengan orang yang berada pada tangga paling atas? Hitamkan pada salah satu lingkaran yang menunjuk anak tangga tertentu.

4. Sekarang bayangkan Anda sedang berkenalan dengan seseorang yang berada pada **tangga paling atas**. Coba pikirkan bagaimana perbedaan di antara Anda dan kenalan Anda tersebut berdampak pada apa yang akan Anda obrolkan, apa yang akan Anda katakan dalam percakapan itu, dan akan seperti apa interaksi itu berlangsung. Tulislah minimal 2 kalimat pada tiap item pertanyaan di bawah ini.

Tentang apa saja (tema) yang akan Anda obrolkan?

Apa yang akan Anda katakan dalam percakapan itu?

Bagaimana interaksi itu berlangsung?

- c. Seberapa pantas prosedur pembagian bonus antara Anda dan teman Anda yang diterapkan oleh koordinator tim?

1 2 3 4 5 6 7
(sangat tidak pantas) (sangat pantas)

- d. Seberapa tepat prosedur pembagian bonus antara Anda dan teman Anda yang diterapkan oleh koordinator tim?

1 2 3 4 5 6 7
(sangat tidak tepat) (sangat tepat)

- e. Seberapa puas Anda terhadap prosedur pembagian bonus antara Anda dan teman Anda yang diterapkan oleh koordinator tim?

1 2 3 4 5 6 7
(sangat tidak puas) (sangat puas)

Identitas Anda

Jenis kelamin : laki-laki perempuan

Umur : tahun

Suku :

Pekerjaan orangtua : Ayah :

Ibu :

Pendidikan orangtua :

Ayah

Ibu

tidak sekolah/tidak tamat SD

tidak sekolah/tidak tamat SD

SD

SD

SMP

SMP

SMA/SMK

SMA/SMK

Diploma I, II, III

Diploma I, II, III

S-1

S-1

S-2

S-2

S-3

S-3

Pendapatan keluarga (ayah dan ibu) :

kurang dari 1 juta/bulan

antara 5 - 7,5 juta/bulan

antara 1 - 2 juta/bulan

antara 7,5 - 10 juta/bulan

antara 2 - 3,5 juta/bulan

antara 10 - 15 juta/bulan

antara 3,5 - 5 juta/bulan

lebih dari 15 juta/bulan

Contreng (√) pada tanda [] yang sesuai dengan diri Anda.

Terima kasih atas partisipasi Anda.

Output analisis statistik

Studi pilot: Independent sample t-test kelas sosial subjektif

Group Statistics					
Kelas sosial		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kelas sosial subjektif	Low	21	5.67	1.278	.279
	Up	22	6.73	2.313	.493

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
				F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
		Lower	Upper							
Kelas sosial subjektif	Equal variances assumed	8.140	.007	-1.848	41	.072	-1.061	.574	-2.219	.098
	Equal variances not assumed			-1.872	33.032	.070	-1.061	.567	-2.213	.092

Studi 1: Manipulation check kelas sosial subjektif

Group Statistics					
Kelas sosial		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kelas sosial subjektif	Up	64	5.84	1.845	.231
	Low	75	5.12	1.315	.152

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality		t-test for Equality of Means						
		of Variances		t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.						Lower	Upper
Kelas sosial subjektif	Equal variances assumed	7.221	.008	2.690	137	.008	.724	.269	.192	1.256
	Equal variances not assumed			2.621	111.594	.010	.724	.276	.177	1.271

Studi 1: Manipulation check prosedur

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Check Prosedur

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	328.308 ^a	3	109.436	63.029	.000
Intercept	1702.494	1	1702.494	980.546	.000
kelas_sosial	.368	1	.368	.212	.646
prosedur	325.332	1	325.332	187.374	.000
kelas_sosial * prosedur	.051	1	.051	.029	.865
Error	234.397	135	1.736		
Total	2283.000	139			
Corrected Total	562.705	138			

a. R Squared = .583 (Adjusted R Squared = .574)

Studi 1 : Analisis regresi berganda

Model Summary^d

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics						Durbin-Watson
				R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change		
1	.071 ^a	-.003	1.80685	.005	.660	1	132	.418	1.666	
2	.476 ^b	.214	1.59952	.221	37.437	1	131	.000		
3	.488 ^c	.209	1.60520	.012	.691	3	128	.559		

a. Predictors: (Constant), Kelas sosial

b. Predictors: (Constant), Kelas sosial, Prosedur

c. Predictors: (Constant), Kelas sosial, Prosedur, Suku, Interaksi, Jenis kelamin

Model Summary^d

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.071 ^a	.005	-.003	1.80685	.005	.660	1	132	.418	1.666
2	.476 ^b	.226	.214	1.59952	.221	37.437	1	131	.000	
3	.488 ^c	.238	.209	1.60520	.012	.691	3	128	.559	

a. Predictors: (Constant), Kelas sosial

b. Predictors: (Constant), Kelas sosial, Prosedur

c. Predictors: (Constant), Kelas sosial, Prosedur, Suku, Interaksi, Jenis kelamin

d. Dependent Variable: Penilaian keadilan prosedural

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.024	.157		25.674	.000	3.714	4.334					
	Kelas sosial	-.127	.157	-.071	-.812	.418	-.437	.183	-.071	-.071	-.071	1.000	1.000
2	(Constant)	4.009	.139		28.889	.000	3.734	4.283					
	Kelas sosial	-.154	.139	-.085	-1.109	.270	-.428	.121	-.071	-.096	-.085	.999	1.001
	Prosedur	.846	.138	.471	6.119	.000	.572	1.119	.468	.471	.470	.999	1.001
3	(Constant)	4.185	.197		21.230	.000	3.795	4.575					
	Kelas sosial	-.137	.140	-.076	-.976	.331	-.415	.141	-.071	-.086	-.075	.983	1.018
	Prosedur	.842	.140	.468	6.010	.000	.565	1.119	.468	.469	.464	.980	1.021
	Interaksi	.052	.139	.029	.376	.707	-.223	.328	-.017	.033	.029	.991	1.009
	Jenis kelamin	-.446	.412	-.085	-1.083	.281	-1.262	.369	-.134	-.095	-.084	.973	1.028
	Suku	-.259	.279	-.072	-.928	.355	-.812	.294	-.045	-.082	-.072	.996	1.004

a. Dependent Variable: Penilaian keadilan prosedural

Studi 2: Manipulation check kelas sosial subjektif

Group Statistics					
Kelas sosial		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kelas sosial subjektif	Up	56	6.05	1.577	.211
	Low	55	5.47	1.230	.166

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Kelas sosial subjektif	Equal variances assumed	2.614	.109	2.161	109	.033	.581	.269	.048	1.114
	Equal variances not assumed			2.166	103.704	.033	.581	.268	.049	1.113

Studi 2: Manipulation check prosedur

Descriptive Statistics				
Dependent Variable: Check Prosedur				
Kelas Sosial	Prosedur	Mean	Std. Deviation	N
Low	unaccurate	4.04	2.047	27
	accurate	5.21	1.397	28
	Total	4.64	1.829	55
Up	unaccurate	3.54	1.815	28
	accurate	5.00	1.122	28
	Total	4.27	1.668	56
Total	unaccurate	3.78	1.931	55
	accurate	5.11	1.260	56
	Total	4.45	1.752	111

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Check Prosedur

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	52.836 ^a	3	17.612	6.621	.000
Intercept	2194.333	1	2194.333	824.875	.000
kelas_sosial	3.552	1	3.552	1.335	.250
prosedur	48.396	1	48.396	18.193	.000
kelas_sosial * prosedur	.571	1	.571	.215	.644
Error	284.642	107	2.660		
Total	2536.000	111			
Corrected Total	337.477	110			

a. R Squared = .157 (Adjusted R Squared = .133)

Studi 2 : Analisis regresi berganda

Model Summary^d

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.097 ^a	.009	.000	1.76929	.009	1.026	1	107	.313	
2	.428 ^b	.184	.168	1.61394	.174	22.590	1	106	.000	
3	.448 ^c	.200	.161	1.62038	.017	.720	3	103	.542	2.179

a. Predictors: (Constant), Kelas sosial

b. Predictors: (Constant), Kelas sosial, Prosedur

c. Predictors: (Constant), Kelas sosial, Prosedur, Interaksi Kelas prosedur, Jenis kelamin, Suku

d. Dependent Variable: Penilaian keadilan prosedural

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Partial	Tolerance
1 (Constant)	4.402	.169		25.976	.000	4.066	4.738					
Kelas sosial	-.172	.169	-.097	-1.013	.313	-.508	.164	-.097	-.097	-.097	1.000	1.000
2 (Constant)	4.396	.155		28.432	.000	4.089	4.702					
Kelas sosial	-.178	.155	-.101	1.154	.251	-.485	.128	-.097	-.111	-.101	1.000	1.000
Prosedur	.735	.155	.417	4.753	.000	.428	1.041	.416	.419	.417	1.000	1.000
3 (Constant)	4.509	.245		18.376	.000	4.022	4.996					
Kelas sosial	-.184	.155	-.104	1.182	.240	-.492	.124	-.097	-.116	-.104	.999	1.001
Prosedur	.778	.159	.441	4.898	.000	.463	1.093	.416	.435	.432	.956	1.046
Interaksi Kelas prosedur	.063	.158	.036	.399	.691	-.250	.375	.059	.039	.035	.971	1.030
Jenis kelamin	.178	.334	.047	.532	.596	-.485	.841	.003	.052	.047	.974	1.027
Suku	-.378	.321	-.107	1.175	.243	-1.015	.260	-.039	-.115	-.104	.940	1.064

a. Dependent Variable: Penilaian keadilan prosedural

Cronbach- α Studi 1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.908	.911	3

Inter-Item Correlation Matrix

	item_3	item_4	item_5
item_3	1.000	.806	.729
item_4	.806	1.000	.785
item_5	.729	.785	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_3	8.14	12.704	.812	.673	.879
item_4	8.05	14.295	.856	.733	.839
item_5	7.98	14.644	.794	.643	.887

Cronbach- α Studi 2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.919	.920	3

Inter-Item Correlation Matrix

	item_2	item_3	item_4
item_2	1.000	.776	.756
item_3	.776	1.000	.849
item_4	.756	.849	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_2	8.76	12.913	.796	.636	.918
item_3	8.76	13.458	.866	.763	.860
item_4	8.72	13.330	.849	.745	.872

Uji Normalitas Studi 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		134
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.57474242
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.048
	Negative	-.087
Kolmogorov-Smirnov Z		1.004
Asymp. Sig. (2-tailed)		.266

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Normalitas Studi 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		109
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.58243142
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.058
	Negative	-.095
Kolmogorov-Smirnov Z		.995
Asymp. Sig. (2-tailed)		.275

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.